



BAPPENAS

LAPORAN AKHIR

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KERJASAMA
DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2010

KATA PENGANTAR

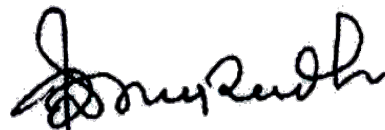
Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya dan atas kehendaknya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur tahun anggaran 2010.

Dalam pembuatan laporan akhir ini kami telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, dan pada tempatnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Bappenas dan seluruh staf yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Staf yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi dan data.
3. Kepala BPPS Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data.
4. Kepala Dinas dan Instansi terkait yang berhubungan dengan materi yang dibahas yang telah memberikan informasi dan kelengkapan data.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasama.

Laporan ini penyusunannya telah diupayakan seoptimal mungkin, tetapi kami menyadari masih banyak kekurangannya disana sini, sehingga kami sangat mengharapkan, kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih sempurnanya penyusunan laporan ini. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Samarinda, Desember 2010
Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU
NIP. 19550410 198301 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 3 |
| Tujuan dan Sasaran | 3 |
| Keluaran | 3 |
| BAB II | |
| HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 | 4 |
| A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI | 4 |
| 1. Indikator | 4 |
| 2. Analisis Pencapaian Indikator | 4 |
| a. Indeks Kriminalitas | 4 |
| b. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional | 5 |
| c. Persentase penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional | 5 |
| 3. Rekomendasi | 5 |
| B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS | 6 |
| 1. Indikator | 6 |
| 2. Analisis Pencapaian Indikator | 7 |
| a. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani disbanding Dengan dilaporkan | 7 |
| b. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap | |
| 3. Rekomendasi | 28 |
| C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 28 |
| 1. Indikator | 28 |
| 2. Analisis Pencapaian Indikator | 31 |
| a. Indeks Pembangunan Manusia | 31 |
| b. Pendidikan | 32 |
| c. Kesehatan | 36 |
| d. Keluarga Berencana | 39 |
| e. Ekonomi Makro | 42 |
| f. Investasi | 48 |
| g. Infrastruktur | 49 |
| h. Pertanian | 51 |
| i. Kehutanan | 53 |
| j. Kelautan | 56 |

| | | |
|---------|--|-----|
| | j. Kesejahteraan Sosial | 57 |
| | 3. Rekomendasi | 60 |
| D. | KESIMPULAN | 66 |
| BAB III | RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI | 67 |
| | 1. Pengantar | 67 |
| | 2. Tabel Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional | 68 |
| | 3. Rekomendasi | |
| | a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi | 103 |
| | b. Rekomendasi Terhadap RPJMN | 104 |
| BAB IV | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 102 |
| | 1. Kesimpulan | 102 |
| | 2. Rekomendasi | 102 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal. |
|---|--|------|
| 1 | Indikator Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai..... | 4 |
| 2 | Indikator Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis..... | 7 |
| 3 | Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Provinsi Kalimantan Timur (Rp Juta) | 14 |
| 4 | Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2010 | 15 |
| 5 | Indikator Agenda Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2009 | 28 |
| 6 | PDRB Kalimantan Timur Tahun 2002-2008 | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal. |
|--|------|
| 1 Grafik GDI Tahun 2004 – 2009 | 25 |
| 2 Grafik GEM Tahun 2004 – 2009 | 28 |
| 3 Indeks Pembangunan Manusia, Kalimantan Timur tahun 2004-2009.. | 31 |
| 4 Angka Partisipasi Murni Tingkat SD Provinsi Kaltim Tahun 2004 2009. | 32 |
| 5 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD Provinsi Kaltim Tahun 2004 – 2009 | 33 |
| 6 Angka Melek Huruf Provinsi Kaltim Tahun 2004 – 2009 | 35 |
| 7 Angka Kematian Bayi | 38 |
| 8 Relevansi Keluarga Berencana | 40 |
| 9 Pertumbuhan Penduduk | 40 |
| 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi | 45 |
| 11 Pendapatan Per Kapita | 45 |
| 12 Persentase Ekspor Terhadap PDRB..... | 46 |
| 13 Laju Inflasi | 47 |
| 14 Nilai Realisasi Investasi | 48 |
| 15 Persentase Jalan Nasional dalam Keadaan Baik, Sedang, dan Rusak di Provinsi Kalimantan Timur | 51 |
| 16 Persentase Jalan Provinsi dalam Keadaan Baik, Sedang, dan Rusak .. | 51 |
| 17 Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis | 54 |
| 18 Pertumbuhan Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur | 58 |
| 19 Tingkat Pengangguran Terbuka..... | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.

Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014

adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.

Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Pelaksanaan EKPD 2010 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiri dari Pendahuluan, Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi dan Rencana Kerja EKPD 2010, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.

B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Keluaran Evaluasi ini diharapkan meliputi:

1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di provinsi Kalimantan Timur
2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014.

C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi

Adapun Anggota dari TIM Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (EKPD) terdiri dari :

Penanggung jawab : Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. (Rektor UNMUL)

Koordinator : Prof. Dra. Hj. Rusmilawati IM, M.Si. (PR IV UNMUL)

Ketua : Prof. Dr. Eny Rochaida, SE, M.Si. (Fekon UNMUL)

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. H. Maman Sutisna, M.Agr. (PR I UNMUL)
2. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M. Agr. (Fahutan UNMUL)
3. Dr. Ir. Sadaruddin, MP (Faperta UNMUL)
4. Drs. Muhammad Noor, M.Si. (Fisipol UNMUL)
5. Drs. Azainil, M.Si. (FKIP UNMUL)
6. Prof. H. A. Waris, SE (Fekon UNMUL)

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009

A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

1. Indikator

Untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang aman dan Damai, dengan indikator yang digunakan antara lain : indeks kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus trans nasional. Indikator yang digunakan seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai.

| No. | Indikator | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | Indeks kriminalitas | TA | TA | TA | TA | TA | TA | |
| 2 | Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan konvensional | TA | TA | TA | TA | TA | TA | |
| 3 | Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional | - | - | - | 8872 | - | 8439 | |

2. Analisis Pencapaian Indikator

a. Indeks Kriminalitas

Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Provinsi penyumbang devisa terbesar di Indonesia, pada kenyataannya sekaligus juga menjadi lumbung korupsi. Terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 27 Juli 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan kasus korupsi sebanyak 1.179 kasus. Kota Samarinda menjadi daerah paling tinggi kasus korupsinya yaitu sebanyak 241 kasus atau 20,44 % dari jumlah keseluruhan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan tentang dugaan korupsi terbanyak diterima pada tahun 2005, yaitu sebanyak 283 kasus.

Meskipun demikian, Kejaksaan Agung menilai bahwa kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur merupakan yang terbaik dalam rangka penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2008. Dari target lima kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mampu menangani 17 perkara.

b. Persentase penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)

Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan angka-angka kriminalitas terutama dari segi kuantitasnya. Akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Demikian seterusnya, sehingga ada anggapan meningkatnya angka kriminalitas merupakan salah satu ekses dari kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah, terutama kemajuan yang belum dapat dinikmati oleh penduduk secara merata dan menimbulkan kesenjangan sosial.

Angka kriminalitas khususnya tindak kejahatan di daerah ini dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan pada POLDA Kaltim. Tercatat jumlah kejahatan yang dilaporkan dari 8.872 kasus (2007) menurun menjadi 8.439 kasus (2009) atau menurun 433 kasus.

c. Persentase penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)

Sedangkan penyelesaian yang dilakukan oleh POLDA Kaltim terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan juga mengalami penurunan. Kalau pada tahun 2007 kasus yang dapat diselesaikan mencapai 60,74 persen dari kasus yang dilaporkan, dan pada tahun 2009 yang dapat diselesaikan menjadi 57,19 persen. Selama periode 2009 jumlah narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Kaltim cenderung menurun. Hal ini berarti bahwa kecenderungan narapidana di POLDA mendapat hukuman ringan sehingga dapat keluar dalam hitungan waktu.

3. Rekomendasi

Untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan angka kriminalitas, kejahatan konvensional, dan kejahatan trans

nasional tidak begitu mengkhawatirkan, namun demikian harus tetap waspada dengan kejahatan konvensional antara lain penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat terlarang lainnya dan berusaha untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang bahayanya narkoba tersebut.

B. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

1. Indikator

Untuk mewujudkan agenda Indonesia yang adil dan demokratis, digunakan dua indikator utama yaitu Pelayanan Publik dan Demokrasi. Untuk pelayanan publik digunakan indikator persentase kasus korupsi yang tertangani dengan yang dilaporkan, persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap dan persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian. Sementara itu untuk demokrasi digunakan indikator Gender Development Indeks (GDI) dan Gender Empowerment dan Measurement (GEM). Untuk mewujudkan agenda Indonesia yang adil dan demokratis secara rinci terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis.

| No. | Indikator | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|--|
| | Pelayanan Publik | | | | | | | |
| 1 | Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%) | - | - | - | - | 27 | - | |
| 3 | Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian (WTP) (%) | - | - | - | - | 21,4 | - | |
| | Demokrasi | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 1 | Gender Development Index | 54,23 | 54,90 | 56,60 | 58,07 | 58,12 | 62,52* | |
| 2 | Gender Empowerment Measurement | 43,8 | 46,5 | 48,9 | 49,56 | 49,74 | 50,05* | |

*Tahun 2009 angka prediksi.

2. Analisis Pencapaian Indikator

a. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan.

Data kasus korupsi tidak tersedia secara runtut waktu namun diperoleh informasi pada tahun 2003-2007 kasus korupsi yang dapat ditangani mencapai 92%, kemudian surat pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota dilaksanakan pemeriksaan dan terbukti kebenarannya sebanyak 119 kasus atau 51,74%, dari 119 kasus kasus pengaduan yang terbukti kebenarannya telah selesai ditindak lanjuti sebesar 118 kasus atau sebesar 9,16%, dan 1 (satu) kasus masih dalam proses penyelesaian.

Untuk kasus korupsi di lingkungan PNS yang ditangani oleh Biro Hukum dalam permintaan atau kesaksian dari kejaksaan atau Kepolisian sebanyak 13 kasus kemudian meningkat menjadi 22 kasus, namun semuanya sudah tertangani.

Dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan terutama dalam rangka meningkatkan integritas moral dan profesional aparat penegak hukum.

Dalam rangka untuk mengantisipasi kerugian negara/daerah provinsi Kalimantan Timur telah membuat Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) tahun 2007-2012 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) tahun 2004-2009. Untuk mencapai keberhasilan RAD-PK Kaltim tersebut dibutuhkan lingkungan yang kondusif dengan persepsi dan komitmen aksi yang kuat dari pimpinan dengan semua unsur yang ada di bawahnya. Adanya RAD-PK Kaltim ini diharapkan dapat mengurangi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran HAM dalam mengurangi kasus kerugian

negara sehingga tercipta system pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

b. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa system pelayanan satu atap cukup memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas dalam pelayanan public. Berbagai indicator system pelayanan mulai dari proses pelayanan, waktu, biaya, kompetensi petugas dan keterbukaan informasi. System pelayanan satu atap ini membawa perubahan kearah pelayanan yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pelayanan kepegawaian dengan menerpkan kartu pegawai elektronik (KPE). Selain itu juga ada pelayanan Samsat secara *on line* yang merupakan produk pertama di Kalimantan Timur dan Indonesia. Ada beberapa daerah kabupaten/kota yang juga melakukan pelayanan satu atap untuk perizinan dalam penanaman investasi.

c. Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan kriteria terdapat 4 tingkat penilaian pengelolaan keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar (adverse), tidak memberikan penilaian (disclaimer). Dari hasil pemeriksaan oleh BPK yang telah melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan provinsi Kalimantan timur secara keseluruhan mendapat penilaian tidak wajar. Ada beberapa ítem kelemahan dalam laporan keuangan provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 antara lain:

1. Pencatatan dan pelaporan pendapatan PKB dan BBNKB kurang memadai.
2. Laporan keuangan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah tidak menggambarkan hal yang sebenarnya.
3. Kesalahan penganggaran.
4. Bendahara umum belum menetapkan mekanisme penyerahan atas penerimaan dan penerimaan kas.
5. Tidak seluruh sipa dikonsolidasikan.
6. Masalah aset yang belum beres.

Sementara itu untuk kabupaten/kota diperoleh informasi bahwa kota Balikpapan, Bontang dan Malinau penilaian keuangannya mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP), sedangkan 10 kabupaten/kota yang lain penilaian keuangannya sama dengan provinsi dan hanya ada satu kabupaten yang mendapat predikat *disclaimer*.

d. Pemekaran Wilayah

Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami pemekaran wilayah. Provinsi Kalimantan Timur telah berusia 64 tahun, dalam perjalanan usianya Provinsi ini telah melakukan pemekaran wilayah kabupaten sebanyak 3 (tiga) kali. Pemekaran Pertama, dilakukan pada tahun 1997 dengan memekarkan : 1). Kabupaten Bulungan, menjadi Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan; 2). Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kukar, Kutim, Kubar dan Kota Bontang; Kedua, dilakukan tahun 2002, dengan memekarkan Kabupaten Paser, menjadi Kabupaten Paser dan Kabupaten Paser Penajam Utara; dan Ketiga, tahun 2007 memekarkan Kabupaten Bulungan, menjadi Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

Sejauh ini diakui bahwa kawasan wilayah yang paling berkembang di Kalimantan Timur, adalah kawasan wilayah Selatan, yang dimotori oleh perkembangan 3(tiga) kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang dan didukung oleh beberapa kabupaten yang kaya sumber daya alam (Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Paser, dan Paser Penajam Utara). Kawasan wilayah selatan ini perkembangan ekonominya banyak berorientasi ke Pulau Jawa dan Sulawesi, sedangkan Kawasan Wilayah Utara yang meliputi satu buah kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung kegiatan sosial dan ekonominya berorientasi ke Malaysia Bagian Timur dan Sebagian Pulau Sulawesi, dan hanya sebagian lainnya ke Pulau Jawa. Kawasan perbatasan Kalimantan Timur sebagian besar berada di wilayah utara ini, meliputi Kabupaten Nunukan, dan Malinau, hanya sebagian kecil saja berada di Kutai Barat (wilayah selatan).

Provinsi Kalimantan Timur memiliki garis perbatasan sepanjang 1.038 km, dan hanya 58 km berada di daerah selatan yaitu Kutai Barat, sedangkan sisanya sepanjang 980 km berada di kawasan utara, yaitu di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Kondisi perkembangan kawasan perbatasan ini masih tertinggal, dan banyak hal yang perlu ditangani dengan kewenangan yang lebih baik terkait masalah pembangunan infrastruktur wilayah, penanganan penyelundupan, penjarahan Sumber Daya, masalah tenaga kerja dan lain-lain.

Urgensi pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah sebelah utara Kalimantan Timur ini relevan, dengan kondisi riil kawasan perbatasan, dan pembangunan pedalaman di kawasan utara Kalimantan Timur ini. Kawasan ini perlu didorong dan dipercepat pembangunannya. Terbentuknya Provinsi ini diharapkan akan dapat mendekatkan pelayanan, mendukung kebijakan nasional, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan aktivitas pembangunan yang terasa lamban. Pengelolaan pembangunan, diharapkan akan lebih focus dan hasilnya lebih proporsional dengan pemekaran ini.

Kawasan Wilayah Utara, sebagian besar daerahnya terdiri dari daerah Perbatasan (Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat), dengan demikian daerah ini perlu didorong agar lebih cepat berkembang. Kawasan wilayah Utara ini, juga memiliki beban penopang kepentingan Nasional karena sebagai beranda depan wajah Indonesia, dan basis terdepan dalam system pertahanan dan keamanan Negara.

Perkembangan daerah pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Timur, sejak pembentukannya sampai dengan saat ini, telah memberikan hasil catatan yang baik, dilihat dari banyak hal peningkatan pelayanan publik, hubungan pusat dan daerah, serta demokrasi. Disamping berbagai keberhasilan yang diperoleh Daerah Otonomi Baru, harus juga diakui bahwa tidak sedikit Daerah Otonomi Baru yang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, sehingga jangankan berhasil dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya menambah beban bagi pemerintah di atasnya dalam memberikan subsidi guna pembiayaan kelangsungan Daerah Otonomi Baru tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, maka kriteria atau persyaratan dalam rangka untuk melakukan pemekaran wilayah saat ini tidak lagi mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2004. Pembentukan Daerah Otonomi

Baru atau pemekaran wilayah perlu memenuhi ketentuan seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sekilas sistematika persyaratan-persyaratan baik administrasi, teknis, dan fisik tersebut, yang diperlukan tersebut dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Badan Perwakilan Desa (BKD) untuk Desa dan atau Forum Komunikasi kelurahan untuk Kelurahan, dimana aspirasi yang dituangkan dalam keputusan ini paling sedikit 2/3 dari jumlah desa dan kelurahan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang akan dibentuk.
2. Aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota, DPRD kab/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk keputusan, dan apabila menyetujui untuk pembentukan daerah otonom baru maka harus dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota.
3. Apabila DPRD telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan untuk pembentukan daerah otonom baru yang ditujukan kepada bupati/walikota, untuk hal ini bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
5. Gubernur setelah menerima usulan bupati/walikota tentang pembentukan daerah otonom baru dapat menolak atau menyetujui pembentukan provinsi berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah.
6. Dalam hal gubernur menyetujui pembentukan provinsi baru, maka gubernur menyampaikan usulan pembentukannya kepada DPRD Provinsi.
7. DPRD Provinsi memutuskan menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota dengan keputusan.
8. Setelah DPRD Provinsi mengeluarkan keputusan yang menyetujui pembentukan provinsi maka gubernur membuat beberapa keputusan persetujuan yang diperlukan.
9. Selanjutnya Gubernur mengusulkan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri Negeri;

10. Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk menteri.
11. Berdasarkan hasil penelitian menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan meminta tanggapan tertulis para anggota DPOD pada sidang DPOD.
12. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan tim teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian dan peninjauan lapangan.
13. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.
14. Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.
15. Apabila Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.
16. Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik Penjabat kepala daerah.
17. Peresmian daerah baru dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.
18. Selain itu masih diperlukan catatan-catatan lain yang perlu dipersiapkan sebagai berkas persyaratan pembentukan kabupaten/kota (dukungana data);

Dalam beberapa tahun terakhir ini di Provinsi Kalimantan Timur masih ada tiga Kabupaten yang sedang mengupayakan untuk melakukan pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Disamping itu, usulan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini sudah sampai pada tahap akhir yaitu menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah, dengan persyaratan dan kriteria yang semakin berat, secara tersirat menunjukkan adanya keinginan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan seleksi secara ketat bagi daerah dalam melakukan pemekaran. Lebih-lebih kalau mencermati isi pidato Presiden Republik

Indonesia yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan tentang moratorium dalam pelaksanaan Pemekaran wilayah.

e. Dana Perimbangan

Pemerintah berkomitmen lebih fokus pada pengembangan daerah. Mulai tahun depan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) memfokuskan perhatian dana alokasi khusus (DAK) pembangunan daerah tertinggal yang lebih tinggi pada 2011 dengan pembobotan dana transfer ke daerah. Pemerintah mengalokasikan Rp378,4 triliun dana di RAPBN 2011 untuk ditransfer ke daerah.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Dana Perimbangan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menjadi dana yang dominan dan utama bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minta kepada Pusat agar keberadaan Dana Perimbangan lebih diperhatikan, sehingga penerimaannya dapat meningkat dan disalurkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah.

Mencermati kasus di Kalimantan Timur, pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp 315,2 triliun. Namun pada tahun 2009, hanya mendapatkan dana perimbangan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta 14 kabupaten dan kota lainnya di Kaltim hanya sebesar Rp 17,83 triliun atau 5,65 persen.

Secara konkrit dana perimbangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta empat belas Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan Dana Perimbangan Pertahun Provinsi Kalimantan Timur (Rp Juta)

| Tahun 2003 | DAK | DAU | DBH |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Provinsi | 0 | 76,41 | 0 |
| Kabupaten/Kota | 13.715 | 1,222,420 | 0 |
| Total | 13.715 | 1,298,830 | 0 |
| Tahun 2004 | DAK | DAU | DBH |
| Provinsi | 0 | 66,139 | 0 |
| Kabupaten/Kota | 0 | 1,624,124 | 0 |
| Total | 0 | 1,690,263 | 0 |
| Tahun 2005 | DAK | DAU | DBH |
| Provinsi | 0 | 72,547 | 1,367,629 |
| Kabupaten/Kota | 56,14 | 1,624,123 | 4,638,935 |
| Total | 56,14 | 1,696,670 | 6,006,564 |
| Tahun 2006 | DAK | DAU | DBH |
| Provinsi | 0 | 72,547 | 3,257,825 |
| Kabupaten/Kota | 213,1 | 2,134,978 | 10,887,381 |
| Total | 213,1 | 2,207,525 | 14,145,206 |
| Tahun 2007 | DAK | DAU | DBH |
| Provinsi | 0 | 235,743 | 2,955,291 |
| Kabupaten/Kota | 271,789 | 2,758,997 | 9,875,757 |
| Total | 271,789 | 2,994,740 | 12,831,048 |
| Tahun 2008 | DAK | DAU | DBH |
| Provinsi | 0 | 126,229 | 3,091,304 |
| Kabupaten/Kota | 262,301 | 2,502,843 | 10,036,191 |
| Total | 262,301 | 2,629,072 | 13,127,495 |
| Tahun 2009 | DAK | DAU | DBH |
| Provinsi | 3,811 | 17,867 | 2,488,314 |
| Kabupaten/Kota | 336,821 | 2,160,647 | 8,449,097 |
| Total | 340,632 | 2,178,514 | 10,937,411 |

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim 2010.

Sedangkan dana Perimbangan untuk Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan target dan realisasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Dalam rapat pleno DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 disepakati bahwa Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 senilai Rp 6,23 triliun menjadi APBD definitif. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 6,23 triliun apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 5,76 triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp 473,00 miliar atau 8,21 persen. Adapun pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,07 triliun, Dana Perimbangan Rp 3 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 7,0 miliar.

Tabel 4. Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2010

| No | Jenis Data | Tahun | | | | | Satuan | Sumber | Grafik |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|--------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | |
| Dana Perimbangan | | | | | | | | | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus | | | | | | | | | |
| 1 | Pagu | 24.863.075.400 | 19.428.331.000 | 8.162.000.000 | 268.444.280.000 | 180.819.000.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 2 | Realisasi | 11.530.474.599 | 17.144.131.000 | 8.162.000.000 | 268.443.152.000 | 105.477.841.000 | Rp. | DISPENDA | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | |
| 3 | Pagu | 24.863.075.400,00 | 288.805.000.000 | 283.660.270.000 | 47.985.000.000 | 1.002.800.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 4 | Realisasi | 231.947.083.333 | 264.737.916.667 | 283.660.270.000 | 19.038.214.000 | 300.840.000 | Rp. | DISPENDA | |
| Jumlah bagi hasil pajak | | | | | | | | | |
| 5 | Pagu | 96.000.000.000 | 97.500.000.000 | 152.751.134.000 | 177.761.770.000 | 210.191.770.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 6 | Realisasi | 110.153.036.108 | 13.629.283.080.216 | 132.463.950.876 | 1.897.371.421.400 | 26.898.640.272 | Rp. | DISPENDA | |
| Jumlah bagi hasil bukan pajak | | | | | | | | | |
| 7 | Pagu | 492.850.000.000 | 422.130.255.140 | 447.579.385.845 | 837.905.505.564 | 450.000.000.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 8 | Realisasi | 511.397.892.030 | 384.893.603.905 | 568.230.012.907 | 733.143.884.889 | 310.852.204.131 | Rp. | DISPENDA | |
| Jumlah dana perimbangan | | | | | | | | | |
| 9 | Pagu | 1.000.845.575.400 | 1.179.931.091.640 | 908.652.789.845 | 15.119.267.402 | 1.218.111.420.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 10 | Realisasi | 1.073.888.808.370 | 117.998.149.437.416 | 1.019.293.403.707 | 1.241.025.079.529 | 344.601.236.243 | Rp. | DISPENDA | |
| Jumlah dana perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota | | | | | | | | | |
| 11 | Pagu | 179.252.500.000 | 304.067.505.500 | 318.900.000.000 | 495.451.991.837 | 376.097.850.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 12 | Realisasi | 208.860.322.300 | 276.733.192.000 | 318.900.000.000 | 318.144.052.500 | 103.766.316.000 | Rp. | DISPENDA | |
| Jumlah dana perimbangan dari Propinsi ke Desa | | | | | | | | | |
| 13 | Pagu | - | - | - | - | - | Rp. | DISPENDA | |
| 14 | Realisasi | - | - | - | - | - | Rp. | DISPENDA | |
| 15 | Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota | - | - | - | - | - | Rp. | DISPENDA | |
| 16 | Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Desa | - | - | - | - | - | Rp. | DISPENDA | |
| Hasil perhitungan | | | | | | | | | |
| 17 | Dana Alokasi Umum | 207.880.000.000 | 288.805.000.000 | 283.660.270.000 | 47.985.000.000 | 1.002.800.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 18 | Dana Alokasi Khusus | 24.863.075.400 | 19.428.331.000 | 8.162.000.000 | 268.444.280.000 | 180.819.000.000 | Rp. | DISPENDA | |
| Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak | | | | | | | | | |
| 19 | Pagu Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak | 588.850.000.000 | 519.630.255.140 | 600.330.519.845 | 1.015.667.275.565 | 660.191.770.000 | Rp. | DISPENDA | |
| 20 | Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak | 621.550.928.138 | 521.186.434.707 | 700.693.963.783 | 2.630.515.306.289 | 337.750.844.403 | Rp. | DISPENDA | |

Sumber : Bappeda Prov.Kaltim, 2010

Disebutkan, penyusunan program pembangunan dituangkan dalam RAPBD Kaltim 2010 merupakan hasil dari Musrenbang Provinsi, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2010. Pemerintah Provinsi dengan Visi dan Misi Kaltim 2010 tetap akan melanjutkan beberapa program prioritas dari program-program yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Tetapi dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran maka Pemerintah Provinsi Kaltim akan berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan dan meminimalisir anggaran yang lebih realistis, serta sesuai porsi masing-masing jenis belanja.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2010 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja APBD 2010, merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk : (1) mewujudkan agenda rencana strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan akselerasi visi dan misi

pembangunan Kalimantan Timur, dan (2) mewujudkan agenda pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 yang meliputi 13 (empat belas) isu strategis dan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan dalam pencapaian 6 (*enam*) tujuan bersama (*common goals*).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah, wajib dan pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Adapun esensi dari Kebijakan Umum APBD Tahun 2010 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim menyatakan persetujuannya dan berkomitmen pada tahun 2010, kebijakan pembangunan Kalimantan Timur, adalah :

1. Upaya pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Karena itu pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD disertai program pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
2. Pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik mempengaruhi kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifnya Kalimantan Timur untuk menanamkan investasi. Karena itu, agar terjadi peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan untuk menjaga stabilitas politik di Kalimantan Timur menjadi perhatian di tahun 2010.
3. Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur, pemerintah berusaha untuk tetap konsisten terhadap program prioritas pembangunan daerah. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten/kota dengan program peningkatan dan pelayanan puskesmas 24 jam, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka pemenuhan tenaga medis dan para medis

di kabupaten/kota, disamping peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.

4. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, difokuskan pada, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah strategis, persiapan pembangunan jalan tol (Freeway) Balikpapan – Samarinda sepanjang 87 km yang terbagi dalam tiga paket pengerjaan Balikpapan – Samboja 24,3 km, Samboja – Palaran 45,6 km dan Palaran – Samarinda 16,9 km.
5. Ketersediaan pangan dan akses pangan rumah tangga masih perlu ditingkatkan, terutama rumah tangga miskin agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Dengan permasalahan pokok tersebut, melalui revitalisasi pertanian melalui penguatan kemampuan produksi pangan, perbaikan sistem distribusi dan tataniaga pangan, pengembangan sistem insentif yang mampu dipertahankan, lahan-lahan produktif, produksi bahan pangan, serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan tantangan utama yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan.
6. Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat; peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; penanggulangan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan.
7. Penanganan pembangunan perbatasan dengan prioritas infrastruktur dasar serta pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Dukungan infrastruktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2008 masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain: masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal; masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing sektor riil; dan perlu ditingkatkannya realisasi pembangunan infrastruktur kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta.
8. Pengendalian lingkungan hidup difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas kawasan dan fungsi lindung. Perbaikan lingkungan hidup dengan melakukan

pengecahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang rusak dan tercemar.

9. Infrastruktur dasar dan pasokan energi, difokuskan pada dukungan infrastruktur bagi peningkatan sektor daya saing sektor riil; peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal (SPM); peningkatan ketahanan energi dan dana dukung infrastruktur.
10. Reformasi birokrasi/pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan public; peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan sistem renumerasi daerah.

f. Regulasi

Perubahan UUD 1945, yang dilakukan berturut-turut dengan Perubahan Pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002[1], membawa pula dampak yang besar terhadap perubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah kenegaraan.

Perubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang terjadi menyebabkan perlunya para pembentuk peraturan perundang-undangan menyikapi berbagai perubahan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum yang dibentuk sebelum Perubahan UUD 1945, terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 setelah Perubahan. Sebagai suatu usaha untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang diharapkan tersebut tentunya diperlukan berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

Harmonisasi Peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu dengan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam

pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki Peraturan perundang-undangan mencakup harmonisasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam UU No.10 Tahun 2004 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk semua jenis peraturan perundang-undangan termasuk Perda. Pasal 5 menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan; Pasal 7 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; Pasal 6 tentang asas-asas peraturan perundang-undangan, Pasal 12 tentang materi muatan Perda dan Pasal 15 tentang Prolegda.

Harmonisasi Raperda dengan peraturan perundang-undangan perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas apabila dikehendaki untuk senantiasa dintergrasikan sebagai syarat formal penyusunan Perda seperti halnya proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi RUU, RPP, Rperpres termasuk Rinpres yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rperppu, RPP, dan RanPrepres, dan Peraturan Presiden No.61/2005 tentang Prolegnas. Dalam Peraturan Presiden No.68/2005 antara lain diatur mengenai pembentukan Panitia Antar-departemen, pengajuan surat permintaan keanggotaan Panitia Antar-departemen kepada Menteri dan menteri /pimpinan lembaga terkait; dan penegasan keikutsertaan wakil dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dalam setiap Panitia Antardepartemen dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang dan teknik perancangan perundang-undangan. Dalam Perpres tersebut juga diatur mengenai teknik-teknik pelaksanaan pengharmonisasian termasuk mekanisme penyelesaian dalam hal terdapat perbedaan. Dalam Perpres No. 61 Tahun 2005 diatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dalam Pasal 14 s.d 17, yang pada intinya menentukan bahwa RUU sebelum dimintakan persetujuan Presiden sebagai Prolegnas terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Model pengharmonisasian peraturan perundang-undangan ditingkat Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung hukumnya berdasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.10/2004 bahwa tata cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal dari gubernur, bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres ini semestinya segera dibentuk karena ada kemungkinan daerah mengabaikan harmonisasi Raperda dengan PPU lainnya dengan alasan tidak ada dasar hukum dan pedoman teknis yang cukup kuat selama Perpres tersebut belum ditetapkan. Pentingnya pengaturan pengharmonisasian bagi Raperda diatur dalam Perpres tersebut agar selaras dengan pengaturan di DPRD dalam PP No.16 Tahun 2010 dimana Pasal 53 PP tersebut mengatur bahwa Badan Legislasi Daerah bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Ketentuan Pasal 53 PP tersebut konkordan dengan ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di DPR sebagaimana diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 dimana proses tersebut melekat dalam tugas dari Badan Legislasi.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi PUU yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya bahwa RPP dibuat untuk melaksanakan UU maka RPP tidak dapat mengatur sesuatu hal yang melebihi amanat UU tersebut.

Pembentukan peraturan daerah mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi diberlakukan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan kemudian digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004. Namun diperoleh gambaran umum perda-perda yang telah dibentuk dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan perda menunjukkan gejala bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU Nomor 32/2004 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Beragamnya pertimbangan pembatalan Perda hingga kini tampaknya belum ada data konkrit mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi Perda dengan PUU. Namun demikian jika dicermati kemungkinan besar dalam setiap pembentukan perda bermasalah terdapat satu atau lebih persoalan sebagai berikut:

1. Daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas dalam membentuk Perda maka pembentukan Perda mengabaikan ketentuan-ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan Pembentukan Perda sebagaimana ditetapkan UU No.10/2004 dan UU No.32 Tahun 2004.
2. Daerah memahami prinsip-prinsip pengaturan penyusunan Perda sesuai UU No.10/2004 dan UU No.32/2004 namun kurang kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kurangnya pemahaman dikalangan penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda kemungkinan belum optimal dan belum merata.
5. Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan PUU. Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan Perda hingga kini belum ditetapkan.
6. Bentuk-bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda antara instansi Pemerintah dengan aparat terkait di daerah yang selama ini diterapkan kemungkinan kurang efektif.
7. Peran Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kemungkinan belum optimal.

4. Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik

Upaya penertiban serta peningkatan kualitas kerja dan kinerja pegawai di seluruh instansi Pemerintah di Kalimantan Timur, mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembahasan tentang hasil-hasil Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kalimantan Timur meliputi empat bidang diantaranya Bidang Ekonomi, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pemerintahan, dan bidang Pelayanan dasar. Kriteria Kuantitatif IKK diantaranya, untuk demokrasi produk dibawah nilai 0.3 maka dapat dikatakan bahwa daerah yang bersangkutan belum independen dalam hal produksi, untuk demokrasi alokasi dan konsumsi dibawah 0.3 maka dapat dikatakan bahwa daerah yang bersangkutan partisipasi masyarakat untuk menikmati hasil produksi daerah tidak tercapai. Untuk pemilikan faktor produksi jika nilainya dibawah 0.3 maka dapat dikatakan daerah bersangkutan masyarakatnya tidak dapat memiliki akses untuk berpartisipasi dalam hal pemilikan faktor produksi. Pada bidang lingkungan hidup, pembangunan berbasis pemanfaatan SDA merupakan proses perubahan ekosistem, aspek lingkungan merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan ekosistem tersebut, evaluasi kinerja pembangunan berbasis pemanfaatan SDA harus memfokuskan pada dua arah penilaian yaitu “ forward dan backward”, re-investasi merupakan upaya yang mutlak harus dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pada bidang Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dasar menyampaikan indikator kinerja utama (kuantitatif dan/ atau kualitatif) yang menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah. Sedangkan pada bidang pemerintahan terdapat beberapa point dalam indikator Kinerja Kunci diantaranya: permasalahan perencanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan Pengelolaan aparatur pemerintahan. Agar monitoring evaluasi terhadap kinerja SKPD (IKK) dapat berjalan optimal maka diisyaratkan Manajemen data yang akurat, valid dan update ditingkat SKPD. IKK dari pemerintah pusat sebaiknya ditajamkan dan disesuaikan dengan kondisi lokal spesifik,

mengingat IK yang ada di SK Mendagri terkadang juga tidak sempurna. Target dan Indikator kinerja yang dilaksanakan secara konsisten akan bisa dijadikan tolak ukur yang obyektif dalam penilaian kinerja para pejabat struktural daerah, dalam hal ini target kinerja dan IKK bisa dijadikan kontrak bagi pejabat struktural daerah.

a. Demokrasi

1). Gender Development Index

Pertumbuhan penduduk Kaltim sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 mencapai 3,81%. Atau boleh dikatakan berada diatas pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,47%. Tentunya data ini sangat penting menjadi kajian dalam rangka menentukan kebijakan perencanaan menyusun program untuk mendukung Kaltim Bangkit 2013.

Dengan visi Kaltim Bangkit 2013, yakni terwujudnya Kaltim sebagai pusat Agroindustri dan Energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera, sedangkan salah satu misi dari Pembangunan Kalimantan Timur yang di cantumkan dalam RPJMD 2009-2013 adalah :

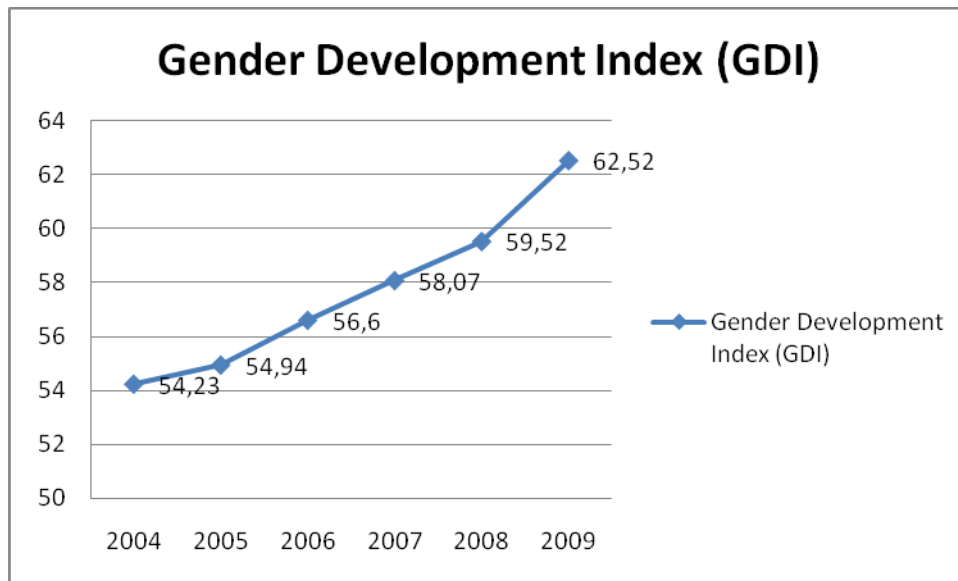
“ Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan manusia Yang Cerdas, Terampil, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Tinggi”

Pembangunan yang berbasis gender salah satu tujuannya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, dimana untuk mencapainya di perlukan suatu poses secara terus menerus dengan partisipasi masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Setempat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan Indeks Komparatif yang di susun memberikan gambaran tentang realitas kompleks manusia Kalimantan Timur merupakan urutan ke 5. Ukuran status pembangunan memiliki kriteria, dengan status sebagai berikut :

- IPM < 50 (rendah)
- 50 < IPM < 66 (menengah bawah)
- 66 < IPM < 80 (menengah atas)
- IPM > 80 (tinggi)

Konsekuensi dari pembangunan yang berbasis gender, tentunya harus melihat pencapaian pembangunan data terpilah antara perempuan dengan laki-laki yang di kenal dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Gambar 1. Grafik GDI Tahun 2004 - 2009

Dari Gambar 1 IPG trendnya meningkat meskipun secara perlahan dapat dilihat dari tahun ke tahun. Tahun 2007 58,07 terjadi kenaikan pada tahun 2008 sebesar 58,12. Tahun 2009 masih dalam prediksi atau angka sementara 62,52 mengingat data tersebut belum dikeluarkan secara pastinya berada pada posisi kelompok menengah bawah (Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2009). Perbedaan tersebut adalah indikasi bahwa Pembangunan yang berbasis gender masih tertinggal di dibandingkan IPM yang ada. Secara geografis, letak yang berjauhan dari masing-masing kabupaten dan kota perlu adanya kajian khusus, karena IPG dari masing-masing kabupaten dan kota Samarinda yang tertinggi tahun 2008 67,82 dan yang terkecil kabupaten Kutai Timur sebesar 51,81.

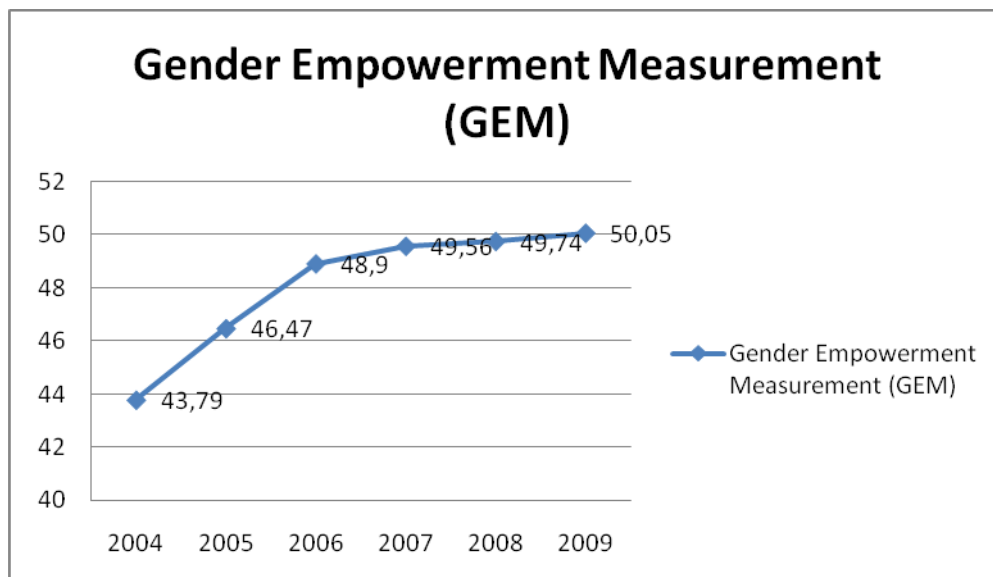
Secara komparatif di bandingkannya IPM dan IPG tahun 2008 dan 2009 (berdasarkan prediksi) analisis di atas adanya kesenjangan yang sangat menyolok dan hasil grafik dapat dilihat untuk tahun 2008-2009, yang berarti harus punya solusi tersendiri mengejar angka yang jauh tertinggal, agar kesenjangan ini bisa di implementasikan pada masa mendatang yang bertumpu pada peningkatan kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak dari berbagai kegiatan yang sudah ada pada program Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kaltim tahun 2008. Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

2). Gender Empowerment Measurement

Pencapaian Pemberdayaan Gender

Pencapaian Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu merupakan ukuran komposit yang dapat dijumlah untuk mengkaji sejauh mana peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya pada aspek ekonomi maupun sosial.

IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)



Gambar 2. Grafik GEM Tahun 2004 - 2009

Dari Gambar 2, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur dalam konteksnya dengan perempuan dilihat dari kehidupan ekonomi perempuan, partisipasi dalam politik, pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang bernuansa pada dimensi IDG pada posisi belum ideal, karena kontribusi ideal berada pada posisi 50, yang berarti menengah ke bawah, untuk kelompok Gender dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPG). Mengingat dari Gambar 2 posisi dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2008 49,74 dan tahun 2009 50,05 (prediksi), karena terlihat untuk Kalimantan Timur perempuan yang berpolitik untuk pemilu tahun 2004 di legislatif yang terlibat perempuan sebanyak

15,56%, laki-laki 84,4% sedang tahun 2009 perempuan di legislatif sebanyak 20%, laki-laki 80%.

Kenaikan tersebut nampak bahwa dari partai politik belum memenuhi quota 30% bagi perempuan, karena nampak kenaikan ini cukup besar dari 7 orang perempuan tahun 2004 menjadi 11 orang perempuan yang duduk di legislative tahun 2009, untuk kedepan tentunya akses dan peluang bagi perempuan Kalimantan Timur tidak tertutup, namun di kembalikan pada perempuan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan dan indikator lainnya, seperti kesehatan, mewujudkan kesetaraan untuk menuju keseimbangan berbasis gender.

Di Indonesia selama ini perempuan berada pada ranah domestik, dengan cara pandang demikian, bagaimana merubah dari kenyataan yang sudah terjadi saat ini, sehingga hak dan martabat kaum perempuan dapat terwujud dan terealisasi.

Karena peraturan perundangan yang berbasis gender dapat di revisi Pasal 27 UUD 1945. Menjamin kesamaan hak bagi seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum.

Kaum perempuan harus segera berbenah diri untuk bisa menghilangkan bias dan kesenjangan gender, sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Sebagaimana pengarahannya Mendagri pada Musrenbang Daerah 2010 (14 April 2010) Rencana Pembangunan Daerah dan Nasional adanya harmonisasi agar tercapainya tujuan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 (September 2000 yang disepakati oleh 68 Negara termasuk Indonesia), menetapkan ke 7 tujuan global yang terdiri dari :

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.
2. Mencapai Pendidikan Untuk Semua.
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Gender.
4. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.
5. Peningkatan Kesehatan Ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Untuk tujuan 3, 4 dan 5 yang sangat konsen dengan pemberdayaan perempuan, konsekuensinya tahun 2015 pencapaian MDGs harus lebih dari tahun sebelumnya. Khususnya untuk pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana dan Anak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menunjuk komitmennya melibatkan program daerah terhadap perempuan memperhatikan indikatornya dan target yang sudah di sepakati pada *Millenium Development Goals* (MDGS).

3. Rekomendasi

1. Sosialisasi berbagai lini untuk mewujudkan kesetaraan gender, sehingga apa yang menjadi target RPJMD untuk mewujudkan MDGS tahun 2015.
2. Pembiayaan yang di dukung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan APBD khusus untuk yang berbasis gender, belum adil dan merata.
3. Komitmen bersama dan kebijakan yang di ambil dengan memperhatikan skala prioritas dan program yang berkesinambungan agar peningkatan kualitas dari perempuan bisa terwujud yang mengarah pada kesetaraan.

C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

1. Indikator

Dalam sub bab bagian C ini akan di bahas capaian berbagai indikator pembangunan antara lain : IPM, Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Ekonomi Makro, Infrastruktur, Kehutanan, Kelautan dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, digunakan berbagai indikator seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Agenda Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2009.

| Agenda Pembangunan | Indikator | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat | Indeks Pembangunan Manusia | 72,2 | 72,9 | 73,3 | 73,77 | 74,52 | 75,11 |
| | Pendidikan | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Murni Tingkat SD | 92,87 | 91,16 | 92,86 | 93,23 | 93,59 | 96,05 |
| | Angka Partisipasi Kaar Tingkat SD | 109,29 | 105,42 | 111,45 | 111,43 | 110,95 | 114,00 |
| | Rata-rata Nilai Akhir | 4,37 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,27 | 6,69 |

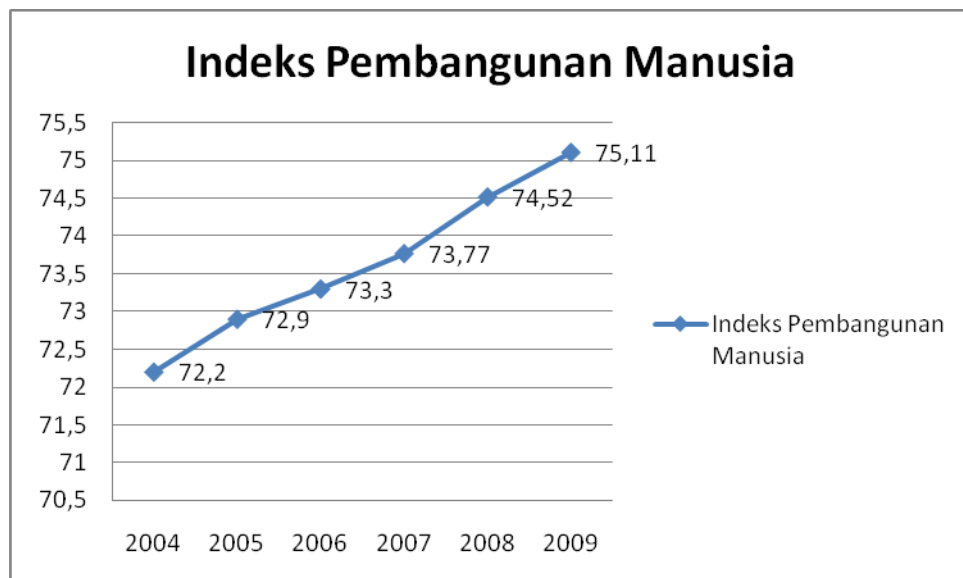
| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | Tingkat SMP | | | | | | |
| | Rata-rata Nilai akhir Tingkat sekolah Menengah | 4,48 | 5,46 | 5,91 | 6,31 | 6,47 | 6,78 |
| | Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) | 3,37 | 3,37 | 4,85 | 3,21 | 2,40 | 1,59 |
| | Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) | 5,46 | 5,20 | 5,10 | 4,43 | 4,09* | 3,74* |
| | Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%) | 3,88 | 4,76 | 5,44 | 2,74 | 2,36* | 1,98* |
| | Angka Melek huruf (%) | 95,00 | 95,30 | 95,50 | 95,70 | 96,71 | 98,30 |
| | Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%) | 78,48 | 78,15 | 77,14 | 87,54 | 87,91 | 88,86 |
| | Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%) | 66,39 | 72,22 | 87,07 | 86,98 | 83,59 | 84,37 |
| | Kesehatan | | | | | | |
| | Umur Harapan Hidup (tahun) | 69,70 | 70,30 | 70,40 | 70,60 | 72,70 | 73,10* |
| | Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) | 24,60 | 26,00 | 21,50 | 26,00 | 19,00 | 17,90 |
| | Gizi Buruk (%) | 6,80 | 1,60 | 1,70 | 6,20 | 1,70 | 1,70 |
| | Gizi Kurang (%) | 18,20 | 12,20 | 12,61 | 13,10 | 12,61 | 8,77 |
| | Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%) | 33,52 | 34,68 | 39,16 | 39,71 | 39,79 | - |
| | Keluarga Berencana | | | | | | |
| | Contraceptive Pravalence Rate (%) | 73,16 | 69,69 | 79,37 | 79,32 | 79,21 | - |
| | Petumbuhan Penduduk (%) | 1,75 | 3,17 | 2,85 | 1,88 | 2,31 | 2,27 |
| | Total Fertility Rate (%) | - | 2,23 | - | 2,70 | - | 2,15* |
| | Ekonomi Makro | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan ekonomi (%) | 1,75 | 3,17 | 2,85 | 1,88 | 4,79 | 2,32 |
| BPS Bappenas | Persentase Ekspor Terhadap PDRB (%) | 103,84 | 107,25 | 112,46 | 107,54 | - | - |
| BPS Bappenas | Persentase Out Put Mnfaktur Terhadap PDRB (%) | 36,68 | 36,60 | 35,98 | 34,80 | - | - |
| Bappeda prov. | Pendapatan Perkapita (Rp). | 48.344.364,00 | 63.286.021,00 | 67.970.624,00 | 70.120.040,00 | 39.219.896,00 | - |
| | Laju Inflasi (%) | | | | | | |
| | Balikpapan | 7,60 | 17,28 | 5,52 | 9,18 | 11,30 | - |
| | Samarinda | 5,65 | 16,64 | 6,50 | 7,27 | 12,69 | - |
| | Tarakan | - | - | - | - | 19,85 | - |
| | Investasi | | | | | | |
| BPS Bappenas | Nilai Realisasi Investasi PMDM (Rp. Milyar) | 5.112,50 | 29,30 | 247,10 | 440,00 | 298,70 | 82,20 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BPS Bappenas | Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDM (Rp. Milyar) | 2.027,10 | 2.035,80 | 53.796,30 | 3.310,40 | - | - |
| BPS Prov | Nilai Realisasi Investasi PMA (US\$ juta) | 350.017,75 | 38.013,53 | 396.453,62 | 720.015,66 | 20.501,16 | 253.046,60 |
| | Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US\$ juta) | 102.376,63 | 548.066,51 | 713.216,30 | 4.366.258,65 | 1.039.762,41 | 5.978.754,94 |
| Bappeda Prov. | Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA | 3.645 | 223 | 4.589 | 2.376 | 567 | 1.898 |
| | Infrastruktur | | | | | | |
| | Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%) | 91,76 | 91,76 | 49,42 | 52,25 | 69,96 | 74,34 |
| | Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%) | 4,61 | 4,61 | 44,44 | 41,99 | 8,35 | 5,78 |
| | Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%) | 3,63 | 3,63 | 6,14 | 5,76 | 21,70 | 19,88 |
| | Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (%) | 63,06 | 58,96 | 59,53 | 63,51 | 78,30 | 63,13 |
| | Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%) | 22,93 | 31,91 | 32,99 | 29,20 | 0,05 | 16,58 |
| | Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%) | 14,01 | 9,13 | 7,48 | 7,29 | 20,64 | 20,29 |
| | Pertanian | | | | | | |
| | Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun | 95,90 | 93,50 | 81,64 | 77,78 | 101,40 | 100,25 |
| | PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) | 8.502.194,24 | 9.535.872,36 | 10.792.274,00 | 11.944.575,15 | 15.666.451,89 | 14.773.500,53 |
| | Kehutanan | | | | | | |
| | Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis (%) | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| | Kelautan | | | | | | |
| | Jumlah tindak Pidana Perikanan | 17 | 11 | 14 | 23 | 18 | 10 |
| | Luas Kawasan Konservasi Laut (km ²) | | | 500 | 500 | | |
| | Kesejahteraan Sosial | | | | | | |
| | Persentase Penduduk Miskin (%) | 11,57 | 10,57 | 11,41 | 11,04 | 9,51 | 7,73 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 10,38 | 13,05 | 13,43 | 12,06 | 11,11 | 11,09 |

2. Analisis Capaian Indikator

a. Indek Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia. IPM merupakan indeks komposit dari angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*man years schooling*), serta *Purchasing Power Parity*. Jika dari ketiga unsur yang membentuk IPM cenderung meningkat maka IPM pun akan meningkat yang berarti program pembangunan dibidang tersebut dapat dikatakan berhasil.



Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia, Kalimantan Timur tahun 2004-2009.

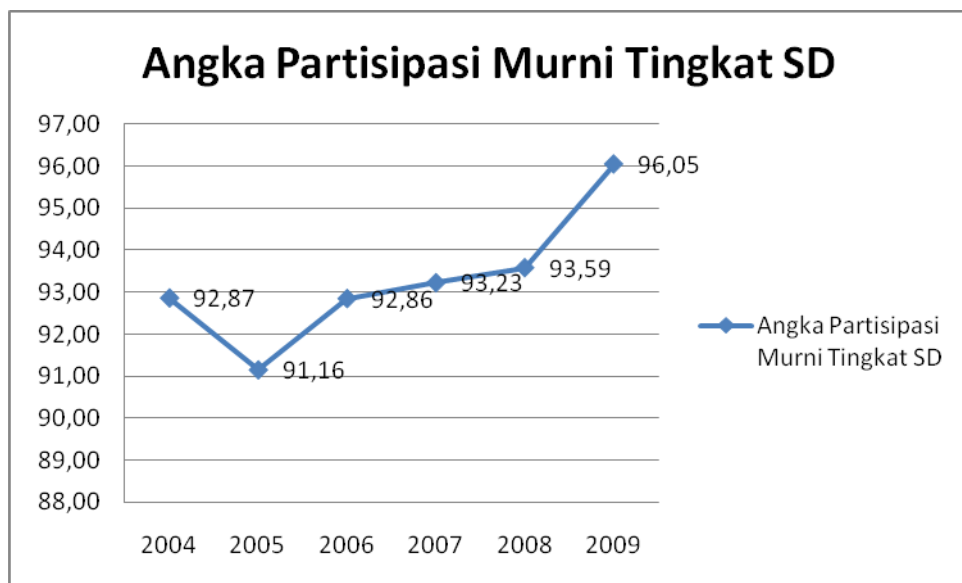
Berdasarkan data yang diperoleh secara runtut waktu dari tahun 2004 sampai 2008, IPM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari 72,20 tahun 2004 menjadi 74,52 tahun 2008. Data tersebut cukup memberikan gambaran bahwa kinerja pembangunan di Kalimantan Timur dibidang pembangunan yang berorientasi sumberdaya manusia memberikan efek positif terhadap peningkatan pembangunan manusianya, dan mendudukkan Kalimantan Timur pada peringkat 5 (lima) nasional pada tahun 2008.

Keberhasilan pembangunan IPM yang berorientasi pada manusia ini tentu saja didukung oleh perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan dan juga ekonomi sehingga peningkatan IPM pun mengikuti perkembangan pembangunan tersebut. Capaian IPM tahun 2009 belum diperoleh, sehingga kenaikannya tidak dapat di gambarkan.

b. Pendidikan

1). Angka Partisipasi Murni

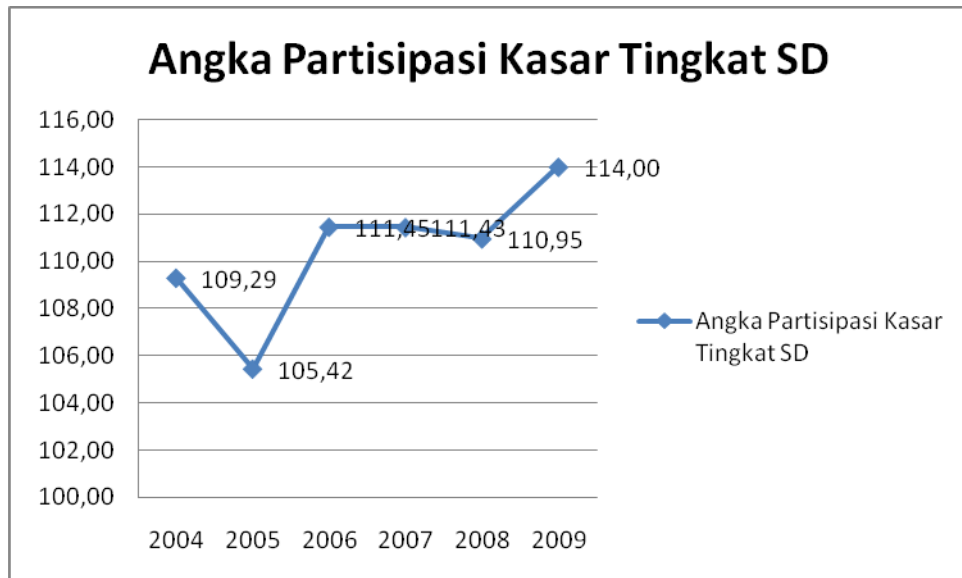
Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2004 untuk jenjang SD mencapai 92,87 %, tahun 2005 menurun sedikit menjadi 91,16%, tahun 2006 naik sedikit menjadi 92,86%, tahun 2007 naik lagi menjadi 93,23%, tahun 2008 naik lagi menjadi 93,59% dan di tahun 2009 menjadi 96,05%. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 6.



Gambar 4. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD Provinsi Kaltim Tahun 2004 2009.

2). Angka Partisipasi Kasar

Secara umum perkembangan pendidikan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini bisa dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2004 untuk jenjang SD mencapai 109,29 %, tahun 2005 menurun sedikit menjadi 105,42 %, tahun 2006 naik menjadi 111,45, kemudian tahun 2007 menurun sedikit menjadi 111, 43%, tahun 2008 menurun sedikit menjadi 110,95%, dan di tahun 2009 menjadi 114,00 %. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD Provinsi Kaltim Tahun 2004 – 2009

Dengan adanya perbaikan dibidang pendidikan di provinsi Kalimantan Timur belum semua daerah terutama yang ada di pedalaman, perbatasan dengan Malaysia, dan daerah terpencil dapat menikmati akses pendidikan, sehingga diperlukan upaya-upaya keberpihakan kepada masyarakat khususnya di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil agar semua masyarakat Kalimantan Timur mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

3). Rata-rata Nilai Akhir Tingkat SMP

Nilai akhir Ujian Nasional tingkat SMP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini bisa dilihat dari tabel dimana pada tahun 2004 nilai rata-ratanya 4,37, tahun 2005 menjadi 5,75. Untuk tahun 2006 sampai tahun 2007 tidak mengalami peningkatan, namun tahun 2008 meningkat menjadi 6,27 dan pada tahun 2009 rata-ratanya meningkat lagi menjadi menjadi 6,69.

4). Rata-rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah

Nilai ujian akhir tingkat Sekolah menengah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana tahun 2004 rata-rata nilainya 4,48 meningkat pada tahun

2005 menjadi 5,46, tahun 2006 menjadi 5,91, tahun 2007 menjadi 6,31, tahun 2008 menjadi 6,47 kemudian meningkat lagi menjadi 6,78 pada tahun 2009.

5). Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%)

Angka putus sekolah tingkat SD mengalami penurunan dari tahun ketahun, namun pada tahun 2006 ada kenaikan menjadi 4,85 %, sedangkan tahun 2007 sampai tahun 2009 mengami penurunan menjadi 1,59%.

6). Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%)

Angka putus sekolah untuk tingkat SMP mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2004 sebesar 5,46%, tahun 2005 menurun menjadi 5,20%, tahun 2006 menjadi 5,10%, sampai tahun 2009 menjadi 3,74%. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Kalimantan Timur dianggap berhasil dengan baik.

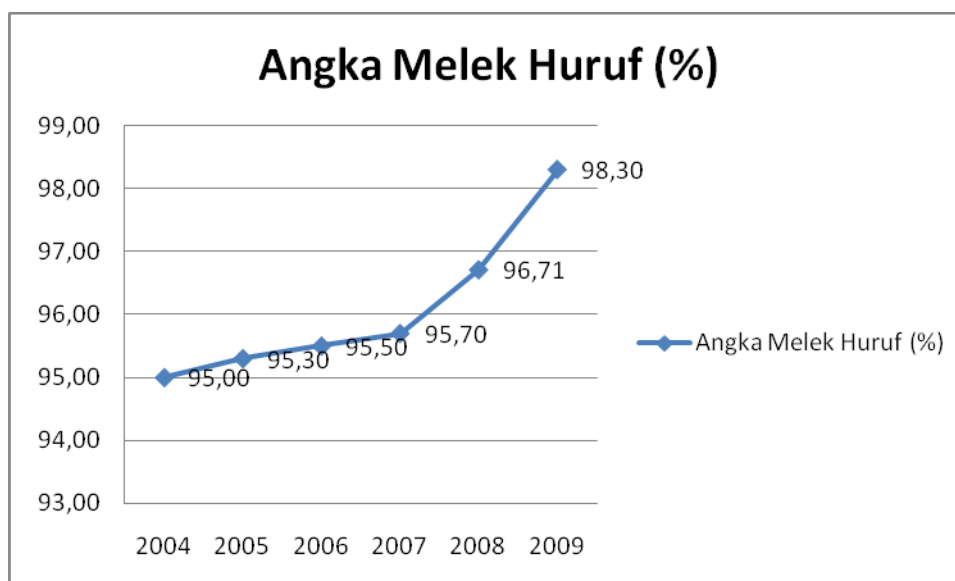
7). Angka Putus Tingkat Sekolah Menengah (%)

Angka putus sekolah untuk Tingkat Sekolah Menengah dari tahun ketahun mengalami penurunan, yaitu tahun 2004 adalah 3,88%, tahun 2005 menurun menjadi 4,76%, tahun 2006 naik 5,44%, kemudian tahun 2007 menurun lagi menjadi 2,74%, kemudian tahun 2008 menjadi 2,36%. Sehingga tahun 2009 menurun menjadi 3,74%. Mulai tahun 2009, Provinsi Kalimantan Timur sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun.

8). Angka Melek Huruf (%)

Angka melek huruf untuk provinsi Kalimantan Timur, dari tahun 2004 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini bisa dilihat daari Gambar 7. dimana pada tahun 2004 sampai tahun 2007 mengalmi peningkatan sedikit, tetapi mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 banyak mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan mulai tahun 2007 sampai sekarang sedang digalakkan Pusat-pusat Kegiatan belajar yang memfokuskan pembelajaran buta aksara bagi para orang-orang tua dan anak-naka yang putus sekolah melalui kegiatan pendidikan non formal yang bekerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerinta Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui

Direktorat Pendidikan Non Formal Direktorat Jenderal Peningkat Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.



Gambar 6. Angka Melek Huruf Provinsi Kaltim Tahun 2004 – 2009

9). Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP

Dengan adanya UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dimana kualifikasi guru dari guru TK/PAUD sampai Guru SLTA minimal S1 (Sarjana), sertifikasi guru dalam jabatan sehingga persentase guru layak mengajar dari tingkat SD, SMP maupun SLTA mengalami peningkatan. Tahun 2004 untuk persentase guru layak mengajar pada tingkat SMP sebesar 78,48% meningkat menjadi 88,86% pada tahun 2009,

10). Persentase guru Layak Mengajar Terhadap guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah.

Persentase guru layak mengajar tingkat SLTA pada tahun 2004 sebesar 66,39% sedang tahun 2009 meningkat menjadi 84,37%. Peningkatan ini didukung oleh pendidikan guru dalam jabatan (Peningkatan kualifikasi guru) melalui dana APBN dan APBD yang bekerjasama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Terbuka (UT).

c. Kesehatan

Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak akan terlepas dari peningkatan pembangunan di bidang kesehatan, derajat kualitas pelayanan dan kuantitas prasarana pendukung di bidang ini menjadi kata kunci untuk mencapai angka yang terbaik. Selain itu peningkatan kemampuan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan juga tidak kalah pentingnya. Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di Kalimantan Timur lebih dititik beratkan pada peningkatan akses atau jangkauan pelayanan khususnya pada daerah terpencil dan perbatasan yang dirasa masih kurang. Berikut akan digambarkan capaian beberapa indikator kesehatan di Kalimantan Timur.

1). Umur Harapan Hidup

Panjangnya umur penduduk berdasarkan pada suatu kohor (cohort) tertentu, antara lain disebabkan oleh perbaikan pembangunan di bidang kesehatan, baik itu berupa infrastruktur yang mendukung, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan maupun jangkauan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Umur harapan hidup di Kalimantan Timur selama periode penelitian (2004 – 2009) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 69,70 tahun 2004 menjadi 72,70 tahun 2008. Capaian umur harapan hidup yang dicapai pada tahun 2008 telah melampaui target yang dicanangkan oleh pemerintah yakni sebesar 70,80 tahun.

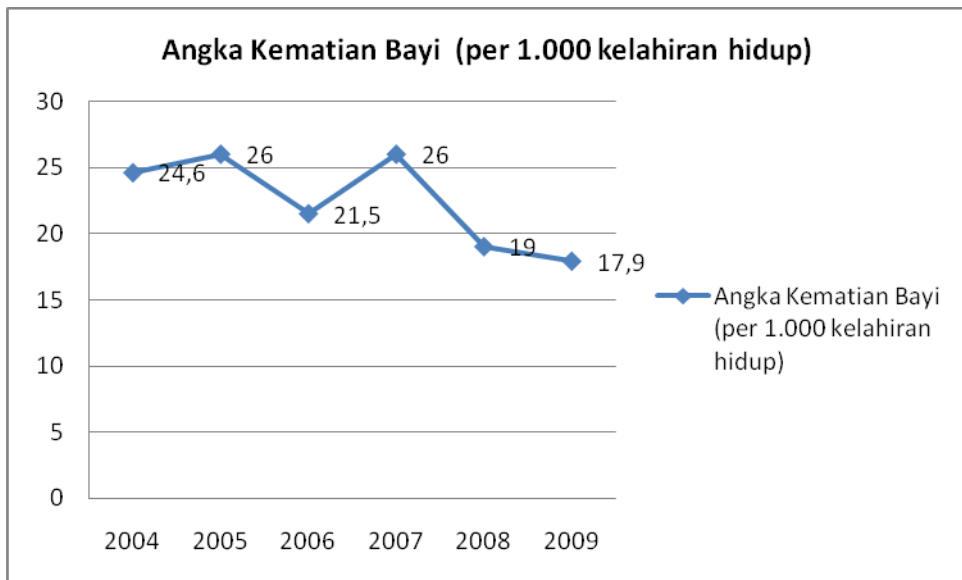
Sementara itu untuk data tahun 2009 masih belum tersedia maka dalam laporan ini digunakan angka prediksi 2010 diperoleh angka 73,1 (Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur, BPS dan UNFPA). Jika angka ini digunakan sebagai capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan maka Kalimantan Timur dapat memberikan warna pembangunan yang berarti.

Harapan capaian pembangunan di bidang kesehatan yang semakin membaik ini tentu harus didukung dengan program-program dan perencanaan serta implementasi yang baik dan juga pendanaan yang layak untuk dialokasikan di bidang ini, Karena dengan meningkatnya umur harapan hidup seseorang maka memerlukan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peningkatan umur yang dilalui penduduk. Peningkatan umur harapan hidup yang terjadi di Kalimantan Timur juga didukung oleh seluruh daerah kabupaten kota yang juga memprioritaskan bidang kesehatan untuk selalu mendapat perhatian yang lebih banyak dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau oleh pembangunan di bidang kesehatan setelah adanya otonomi daerah menjadi lebih

baik, ini tercermin dari perkembangan puskesmas, puskesmas pembantu dan tenaga medis yang ada di daerah.

2). Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup).

Sejak lama program kesehatan di Indonesia di fokuskan pada penurunan angka kematian bayi dan anak yang masih tinggi, Angka kematian bayi dan anak tidak hanya penting untuk mengevaluasi program kesehatan, tapi juga untuk memonitor situasi kependudukan terkini dan mengidentifikasi kelompok penduduk yang mempunyai resiko kematian tinggi.



Gambar 7. Angka Kematian Bayi.

Grafik pada Gambar 7 menunjukkan bahwa angka kematian bayi cenderung tinggi dan fluktuatif pada periode 2004 sampai dengan 2007, pada periode selanjutnya terjadi penurunan yang cukup tajam 26 per 1000 kelahiran (2007) menjadi 17,9 per 1000 kelahiran (2009). Pada tahun 2008 penurunan angka kematian bayi menurun cukup tajam yang menggambarkan bahwa penanganan masalah ini cukup intensif dilakukan. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan ternyata tidak hanya mampu untuk menekan kematian bayi dan anak, tapi juga hal-hal lain erat kaitannya dengan kesehatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang telah menetapkan peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Kebijakan tentang kesehatan ini

termasuk dalam agenda ke tiga dalam prioritas pembangunan di Kalimantan Timur dengan 10 sasaran yang ingin dicapai termasuk di dalamnya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas 24 jam.

Keberhasilan penurunan Angka Kematian bayi ini tidak terlepas dari banyaknya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang juga terus meningkat. Sebagai contoh perkembangan puskesmas dari 186 puskesmas tahun 2004 menjadi 208 puskesmas tahun 2008, selain itu puskesmas pembantu (pustu) juga bertambah dari 640 menjadi 739 pustu pada tahun yang sama. Disamping itu tenaga dokter dan bidan per 100.000 penduduk juga bertambah dari 21,45 (2004) dokter menjadi 25,40 dokter (2008), 43,99 bidang menjadi 45,43 bidan.

3). Gizi Buruk

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas tersebut antara lain pada proses tumbuh kembang anak sejak pembuahan sampai mencapai dewasa muda. Pada masa tumbuh kembang tersebut maka diperlukan pemenuhan dasar anak seperti perawatan dan asupan makanan dengan gizi yang baik dan tercukupi agar menghasilkan sumberdaya yang sehat, cerdas dan produktif.

Masalah gizi ini erat kaitannya dengan masalah kemiskinan dan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, selain itu juga menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang dapat menunjang terlaksananya pola hidup sehat dalam suatu keluarga. Penanggulangan masalah gizi ini cukup komprehensif, karena melibatkan banyak hal antara lain pendekatan medis dan pelayanan kesehatan serta edukasi pengetahuan dan perilaku atau KAP (*Knowledge, Attitude and Practice*)

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau status nutrisinya di bawah standar rata-rata, sehingga masalah gizi buruk ini juga berpengaruh terhadap perkembangan anak dan umur harapan hidup manusia.

Gambaran tentang gizi buruk di Kalimantan Timur fluktuatif dengan rentang yang rendah dan masih di bawah 10 persen. Jika data ini memang akurat dan komprehensif maka capaian ini cukup memberikan arti bahwa masalah gizi buruk di Kalimantan Timur tidak kronis. Meskipun demikian perlu diwaspadai juga bahwa kondisi geografis Kalimantan Timur yang agak ekstrim karena banyak daerah-

daerah yang terisolir dan tidak mudah dijangkau bisa jadi menyebabkan data tentang status gizi buruk yang dikumpulkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Artinya perlu jaringan komunikasi yang baik untuk melaporkan kondisi gizi buruk yang diderita oleh warganya.

4). Gizi Kurang

Akar permasalahan yang bisa dikaitkan dengan masalah gizi ini adalah kemiskinan, jika kemiskinan absolut tidak bisa di kurangi secara drastis apalagi dihapuskan maka masalah ini akan tetap berlanjut.

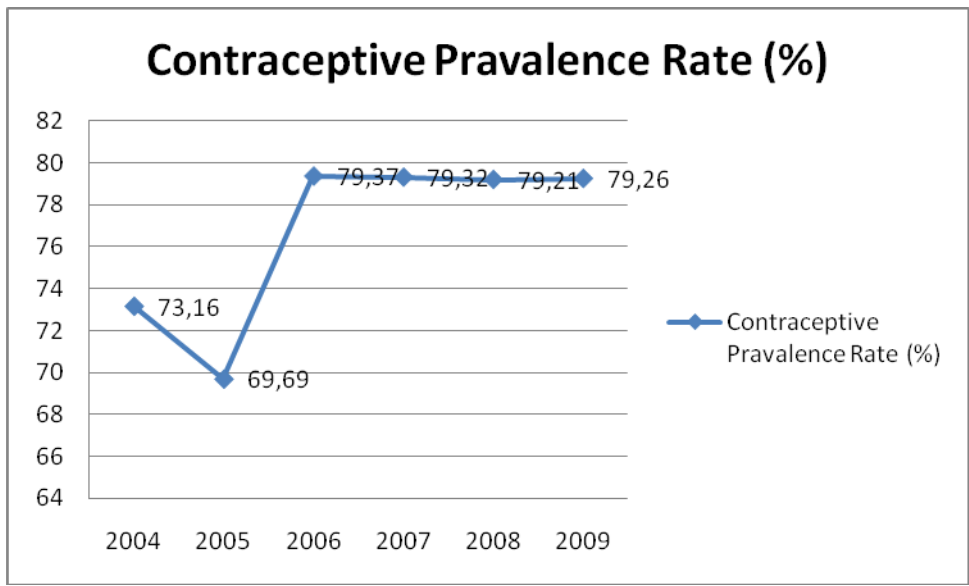
Masalah tingginya prevalensi gizi kurang pada anak balita berhubungan dengan masih tingginya bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), selain itu masalah gizi kurang akan berlanjut pada wanita usia subur yang akan melahirkan anak dengan BBLR.

5). Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk

d. Keluarga Berencana

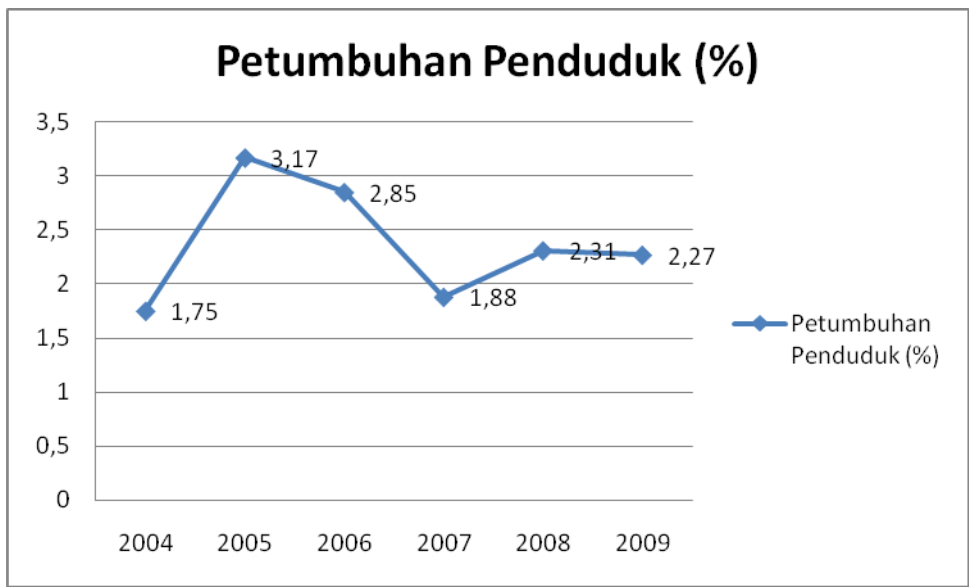
1). Angka Prevalensi

Visi baru program Keluarga Berencana (KB) diarahkan untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam KB yaitu “Seluruh Keluarga Ikut KB), melalui visi ini BKKBN diharapkan memainkan peranan sebagai inspirator, fasilitator dan penggerak KB nasional. Untuk dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera menjadi kenyataan maka BKKBN telah merumuskan lima strategi besar : (1) menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB, (2) menata kembali pengelolaan KB, (3) memperkuat SDM dari program KB, (4) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB dan (5) meningkatkan pembiayaan program KB di semua tingkatan (Profil Kependudukan dan KB, Kalimantan Timur, 2009).



Gambar 8. Relevansi Keluarga Berencana

2). Pertumbuhan Penduduk



Gambar 9. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kalimantan Timur secara absolut dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tahun 2004 tercatat jumlah penduduk sebesar 2.750.369 jiwa meningkat menjadi 3.094.700 pada tahun 2008 dengan demikian terjadi penambahan penduduk sebesar 70 ribu jiwa per tahun. Namun jika dilihat dari

pertumbuhannya secara runtut waktu dalam periode 2005 sampai 2009 mengalami penurunan. Dengan pola persebaran penduduk menurut luas wilayah yang sangat timpang. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan terutama di 2 kota utama yang ada di Kalimantan Timur yakni Samarinda dan Balikpapan.

Berdasarkan kacamata kependudukan ada dua penyebab pertumbuhan penduduk, pertama; pertumbuhan yang disebabkan oleh tingkat kelahiran (fertilitas) dan kedua: pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh arus migrasi masuk yang tinggi ke dalam suatu daerah. Berdasarkan criteria tersebut, Kalimantan Timur termasuk dalam katagori yang kedua. Daya tarik migran masuk ke Kalimantan Timur lebih disebabkan oleh alasan ekonomi, karena dianggap masih mudah untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini didasari dari banyaknya jumlah penduduk dengan suku yang berbeda dengan suku penduduk asli yang berdiam di Kalimantan Timur. Selain itu dapat dideteksi pula dari rasio jenis kelamin sebesar 109,60 yang menunjukkan masih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan.

Berdasarkan pada data dalam grafik pertumbuhan penduduk, dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur mengalami penurunan, dari 3 persen lebih pada periode 2005-2007 menjadi 2,31 persen dan 2,27 persen di tahun 2008 dan 2009.

Penurunan pertumbuhan penduduk yang terjadi tahun 2008 dapat dijelaskan dengan dua skenario tentang terjadinya penurunan pertumbuhan penduduk, pertama; disebabkan oleh berkurangnya industri perkayuan yang mengalami masa *sunset industry* yang biasanya banyak menyerap tenaga kerja dan yang kedua, karena beberapa daerah telah menetapkan aturan kependudukan kepada pendatang untuk membayar sejumlah uang jaminan dan bilamana selama jangka waktu yang telah ditentukan tidak memperoleh pekerjaan maka harus kembali ketempat asal dengan menggunakan uang jaminan tersebut.

Tahun 2009 pertumbuhan penduduk sedikit mengalami penurunan kembali, dengan kondisi yang hampir serupa seperti pada tahun 2008. Karena pertumbuhan alami Kalimantan Timur tidak begitu besar, maka dapat disimpulkan bahwa arus penduduk masuk Kalimantan Timur juga relatif turun.

3). Total Fertility Rate

Ukuran tingkat fertilitas yang umum digunakan adalah angka fertilitas total (*Total Fertility Rate* atau TFR) dan angka fertilitas menurut umur (*Age Specific*

Fertility Rate atau ASFR). TFR adalah jumlah anak yang dilahirkan seorang sampai akhir masa reproduksinya.

Data TFR Kalimantan Timur tidak tersedia secara runtut waktu, sehingga yang dianalisis sesuai dengan data yang tersedia saja yakni tahun 2005 sebesar 2,23, tahun 2007 sebesar 2,24 dan 2010 2,15. Data 2007 terdapat dua versi, yang dari BPS seperti yang disebutkan sebelumnya dan data SDKI 2007 (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia) lebih tinggi yakni sebesar 2,7, sementara data 2010 adalah estimasi yang diperoleh dari buku *Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2005*.

Berdasarkan data tersebut TFR Kalimantan Timur terlihat ada kecenderungan menurun dari 2,24 pada tahun 2005 menjadi 2,15 pada tahun 2010, artinya seorang wanita secara rata-rata akan melahirkan 2,24 di tahun 2005 menurun menjadi 2,15 anak di tahun 2009. Tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia perkawinan pertama wanita dan penggunaan alat kontrasepsi (prevalensi KB). Berdasarkan data usia kawin pertama di Kalimantan Timur tahun 2007 adalah 20,5 tahun (SDKI, 2007) sedangkan angka prevalensi KB sebesar 79,32 artinya apabila umur kawin pertama dan angka prevalensi KB juga meningkat maka angka fertilitas cenderung menurun.

e. Ekonomi Makro

1). Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi daerah dapat di lihat dari beberapa indikator makro antar lain Produk Domestik Regional Bruto dari sisi sektor, maupun penggunaannya, pendapatan regional perkapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi.

a). Produk Domestik regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembentukan Produk Domestik Bruto Kalimantan Timur berdasarkan harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp 98,7 Triliun meningkat menjadi Rp 315,22 Triliun. Rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan timur rata-rata setiap tahun selama 6 ahun terakhir adalah 39,6 % dan pertumbuhan riil berdasarkan harga konstan setiap tahun tumbuh hanya 2,9 %. Perkembangan ini menunjukkan bahawa tingkat harga di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi.

Sektor yang mempunyai peranan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan sektor penggalian. Peranan kedua sektor ini dalam pembentukan PDRB provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2002 adalah 74,41%. Tahun 2008 peran kedua sektor ini dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur meningkat menjadi 80,13 %. Jadi ketergantungan pertumbuhan dan pertumbuhan PDRB tergantung kepada kedua sektor ini. Ini menandakan bahwa sektor ini dalam jangka panjang akan mengalami kegoncangan perekonomian disebabkan ketergantungannya pada sektor yang mengolah sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui.

Sektor ini juga memanfaatkan faktor produksi yang bersifat kapital insentif dan menyerap tenaga kerja lebih rendah di banding sektor pertanian dan ini akan memunculkan ketimpangan.

Kedua sektor ini memerlukan tenaga ahli yang khusus, seperti ahli pertambangan, industri, pemasaran dan akuntansi dan juga keterampilan khusus di bidangnya masing-masing sementara perkembangan angkatan kerja lebih cepat dan persoalan ini akan memunculkan pengangguran yang disebut dengan frictional unemployment

Tabel 6. PDRB KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002-2008 (dlm jutaan

| LAPANGAN USAHA | HARGA BERLAKU | | HARGA KONSTAN | |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2002 | 2008 | 2002 | 2008 |
| Pertanian | 6.674.436 | 15.563.600 | 5.917.495 | 7.057.900 |
| Pertambangan dan Penggalian | 32.206.172 | 144.474.600 | 32.805.477 | 40.513.500 |
| Industri dan Pengolahan | 37.574.394 | 107.982.200 | 34.772.583 | 32.639.700 |
| Listrik dan air bersih | 255.677 | 715.000 | 204.206 | 318.500 |
| Bangunan | 2.787.809 | 6.711.600 | 2.346.919 | 3.588.400 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 6.247.116 | 18.081.800 | 5.411.221 | 8.857.500 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 3.666.178 | 9.360.600 | 3.165.923 | 5.433.100 |
| Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 1.947.552 | 5.632.900 | 1.722.695 | 3.005.300 |
| Jasa-jasa | 2.410.594 | 6.597.900 | 1.503.875 | 2.033.100 |
| Dengan Migas | 93.769.928 | 315.220.400 | 87.850.395 | 103.168.000 |
| Tanpa Migas | 41.265.226 | 182.131.501 | 37.764.413 | 56.016.300 |
| Rata-Rata Pertumbuhan Dengan Migas | | 39,60% | | 2,90% |

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setelah diolah (2009-2013).

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama 7 tahun sejak 2002 sampai dengan 2008 tumbuh 1,74 menjadi 4,82 pada tahun 2008 dengan migas, juga tanpa minyak bumi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dengan menarik garis trend dapat dikatakan cenderung naik.

Sektor yang menonjol pertumbuhannya berturut-turut adalah sektor transportasi, sektor persewaan dan keuangan, sektor bangunan dan sektor pertambangan.

Sektor ini juga tumbuh lebih cepat sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yaitu berbanding 8,2 % dan 5,8 %. Sektor pertambangan, industri pengolahan dan hasil pertanian sangat terpengaruh pada pasaran internasional, hal ini di sebabkan banyak yang di impor seperti ternak, gula dan gandum dan juga minyak masih banyak yang di impor dari luar negeri. Bila terjadi kegoncangan pasar dunia seperti resesi akan banyak mempengaruhi hasil-hasil ekspor Indonesia.

Akibatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dengan migas selama 7 tahun hanya berkisar 1,74 % - 4,28 %.

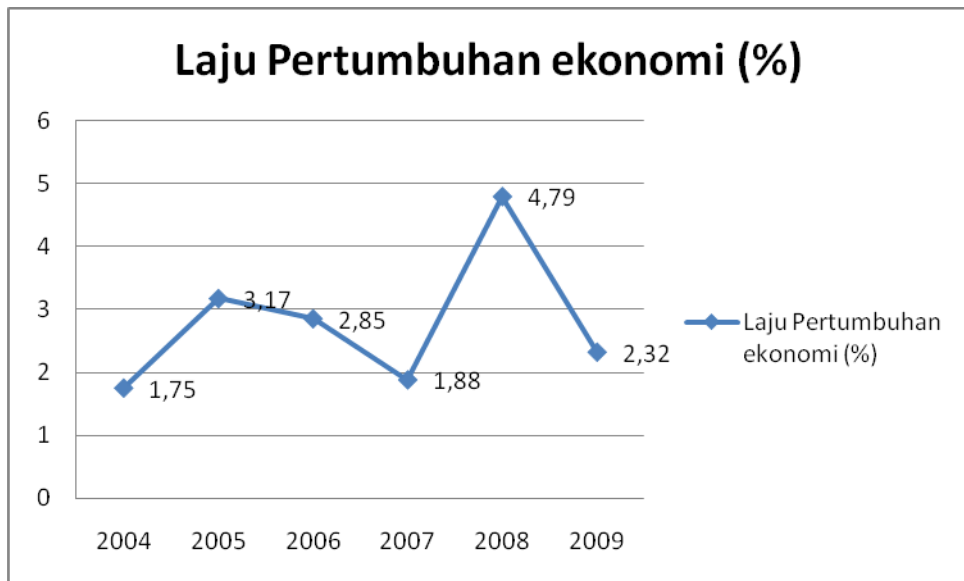
Sedang pertumbuhan dengan migas jauh melampaui pertumbuhan non migas, yaitu 7,23 % - 9,56 %.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur di atas 7 % selama 7 tahun melampaui pertumbuhan nasional khususnya PDRB Provinsi Kalimantan Timur tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang cukup tinggi masih menyisakan ketimpangan, baik secara sektoral wilayah maupun individual ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Ketimpangan yang di maksud adalah ketimpangan Sektor Tradable dan Non Tradable. Yang di maksud pertumbuhan Tradable adalah sektor jasa yang tidak diperdagangkan secara internasional, sedangkan sektor barang yang erat kaitannya dengan produksi dan perdagangan dalam pengertian konvensional meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian termasuk industri. Sedangkan sektor Non Tradable meliputi listrik, air bersih dan gas, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa umum.

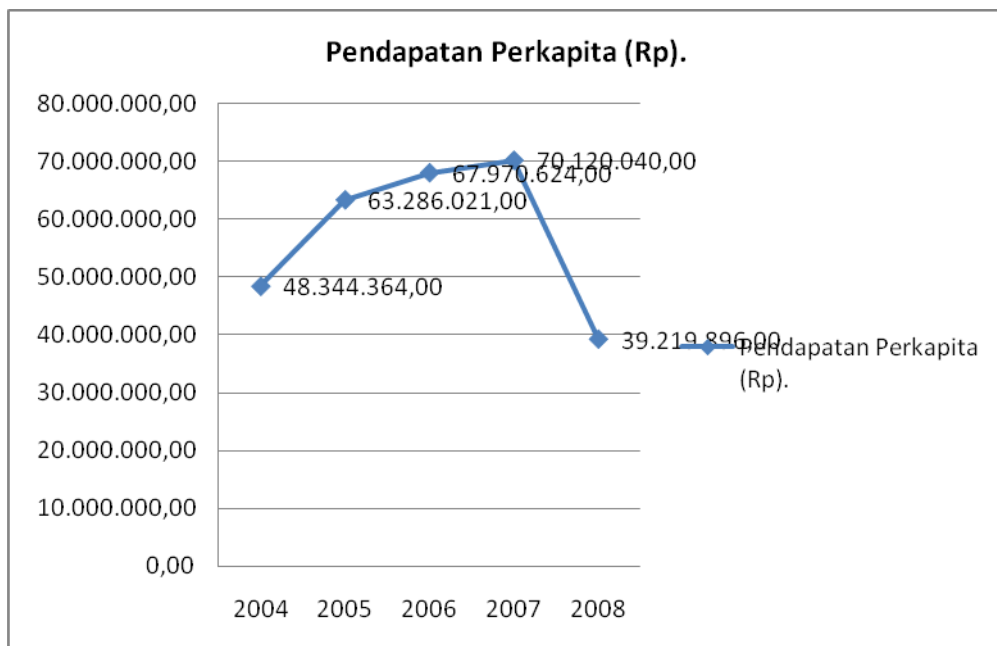
Laju pertumbuhan Sektor Tradable dan Non Tradable Provinsi Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi sektor Non Tradable tumbuh secara stabil di bandingkan dengan Sektor Tradable. Bila dilihat tabel di atas dan curva di atas maka dapat di simpulkan selama 5 tahun Sektor Non Tradable tumbuh lebih tinggi di banding Sektor Tradable, malah tahun 2008 pertumbuhan sektor Non Tradable lebih tinggi di banding Non Tradable (yaitu 7.63 % berbanding 3,11 %).

Sektor Tradable yang terdiri atas sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan, dua diantaranya yaitu sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembentukan PDRB yaitu 81,13 %.



Gambar 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi.



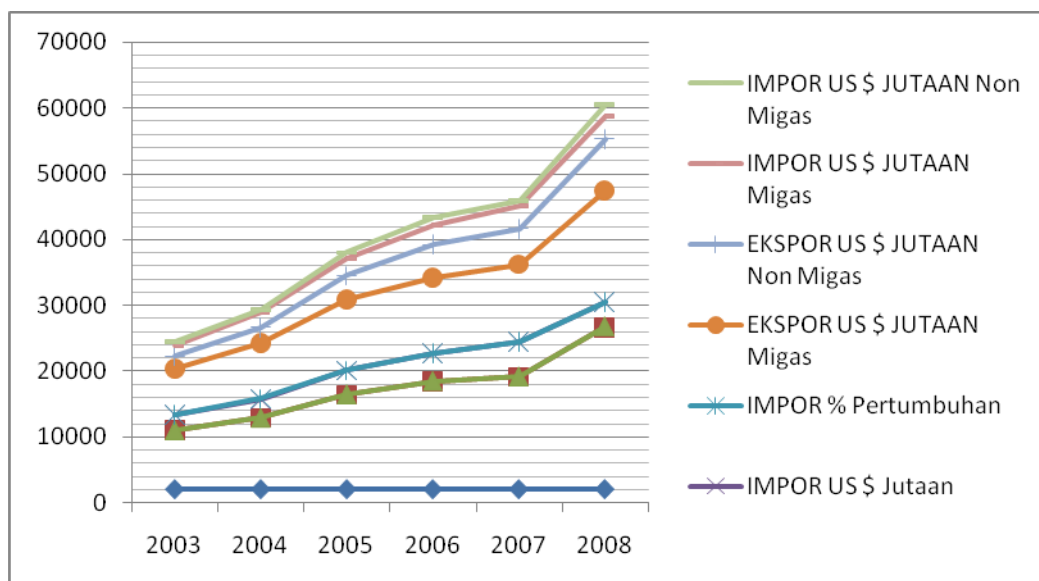
Gambar 11. Pendapatan Per Kapita

b). Persentase Ekspor Terhadap PDRB (%).

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur dari tahun dapat di katakan meningkat terus, ini dapat dilihat dari tabel tersebut diatas, ekspor Kalimantan Timur pada

tahun 2004 bertambah 20,87 % dan tahun 2008 pertumbuhan ekspor adalah 43,84 %. Nilai impor tahun 2003 sebesar US \$ 9.029,14 juta meningkat menjadi US \$ 24.700,04, jadi naik rata-rata ekspor Provinsi Kalimantan Timur selama 2003-2008 adalah US \$ 15.455,84. Kenaikan ekspor mendorong kenaikan impor Provinsi Kalimantan Timur. Impor Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir sekitar 23,88 %. Ini menunjukkan net ekspor Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir adalah 76,12 %.

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur berasal dari ekspor migas dan non migas. Ekspor terbesar adalah 71,91 % adalah migas sisanya 28,09 % berasal dari non migas. Jadi dapat di simpulkan ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur adalah sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, yaitu migas, batubara. Kecenderungan kenaikan ekspor lebih cepat di dibandingkan kenaikan impor. Kenaikan ekspor rata-rata setiap tahun US \$ 1.416,28 juta, sementara impor naik rata-rata setiap tahun US\$ 290,02 (Gambar 14).



Gambar 12. Persentase Ekspor Terhadap PDRB.

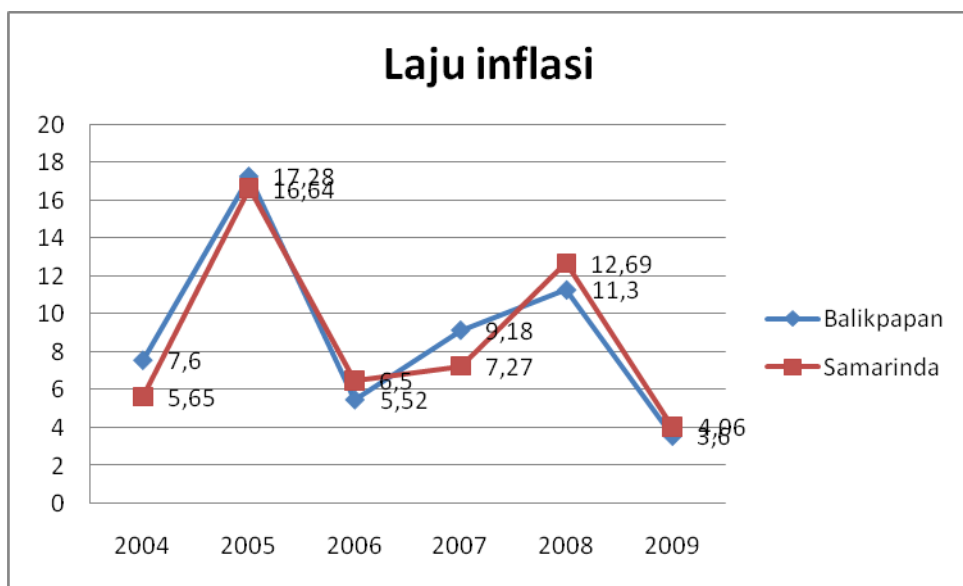
c). Perkembangan Inflasi

Salah satu alat pengukur untuk menentukan tingkat stabilitas ekonomi adalah inflasi. Perkembangan inflasi selama 7 tahun terakhir adalah fluktuatif ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Inflasi pada tahun 2002 adalah 10,78 % turun menjadi 6,54 % pada tahun 2004, meningkat 16,99 % pada tahun 2005, kemudian

turun menjadi 6,60 % pada tahun 2006 dan meningkat kembali menjadi 13,06 % pada tahun 2008. Rata-rata inflasi selama 7 tahun 9,89 %.

Inflasi yang menduduki peringkat tertinggi adalah pendidikan rekreasi. Inflasi kelompok bahan pendidikan rekreasi olahraga selama 7 tahun rata-rata adalah 12,97 %. Peringkat ke dua adalah makanan.

Rata-rata inflasi untuk kelompok ini adalah 11,92 %. Inflasi yang menduduki peringkat ketiga adalah kelompok makanan jadi minuman/rokok. Rata-rata inflasi kelompok ini selama 7 tahun adalah 10,45 %.



Gambar 13. Laju Inflasi

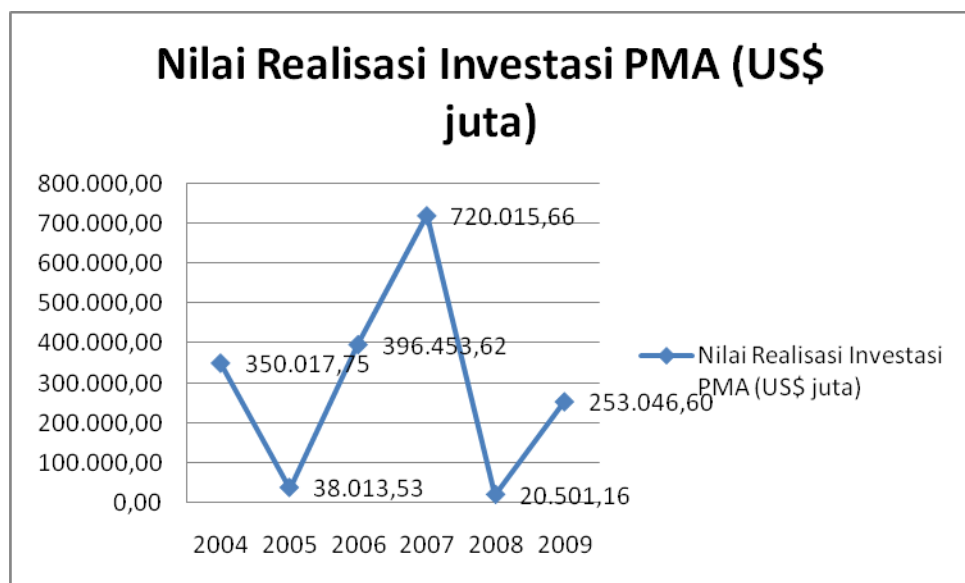
Inflasi yang terjadi di dua kota Provinsi Kalimantan Timur yakni Balikpapan dan Samarinda cenderung fluktuatif berkisar antara 5 sampai 17%. Inflasi di Balikpapan lebih tinggi dibandingkan di Samarinda. Peningkatan inflasi yang terjadi disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditi bahan makanan, sandang yang disebabkan oleh terlambatnya pasokan dan distribusi secara nasional. Komoditi seperti beras, minyak goreng, dan bawang masih dipasok dari luar daerah Kalimantan Timur, sehingga bila distribusi terlambat maka akan berakibat pada kenaikan harga komoditi tersebut, dan mendorong inflasi, selain itu kenaikan BBM dan tarif dasar listrik juga berperan besar dalam mendorong kenaikan harga.

f. Investasi

Sumber investasi dalam menggerakkan perkembangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2. Penanaman Modal Asing (PMA)
3. Investasi Masyarakat
4. Pemerintah baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan Kabupaten.

Selama 5 tahun terakhir peranan investasi Pemerintah adalah 36,57 %, sisanya sebesar 63,43 % berasal dari swasta. Baik itu dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan investasi masyarakat. Total investasi selama 5 tahun di Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp 203,584 triliun, diantaranya Rp 74,447 triliun berasal dari pemerintah dan sisanya



Gambar 14. Nilai Realisasi Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah fluktuatif hal ini disebabkan investasi swasta juga fluktuatif, sementara investasi pemerintah tumbuh secara proporsional sekitar 10,7 % lihat tabel dan grafik di atas.

Pertumbuhan investasi swasta rata-rata setiap tahun selama 5 tahun 64,4 %, namun pada tahun 2005 tumbuh secara negatif 26,34 % dan tahun 2007 secara negatif juga sebesar 49,11 %.

Rata-rata investasi total setiap tahun selama 5 tahun adalah Rp 40,717 triliun.

g. Infrastruktur

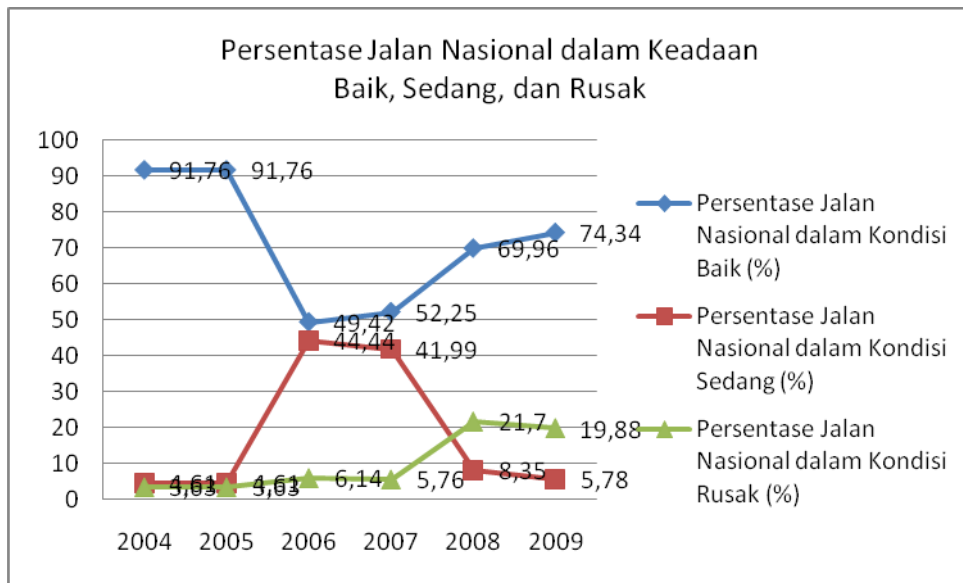
Sebagai sarana penghubung dibidang transportasi darat, jalan merupakan pendukung yang sangat penting untuk mobilitas dan berkembangnya kegiatan perekonomian. Disamping itu jalan penting dalam rangka penyatuan wilayah yang dapat mendorong pembangunan pada masing-masing wilayah. Dari panjang jalan yang ada tersebut kondisinya bervariasi baik, sedang, dan buruk. Kondisi jalan menjadi sangat penting, karena jalan yang dapat dilalui dengan lancar berarti memperlancar perekonomian dan membuka isolasi daerah terpencil.

Pada tahun 2013 direncanakan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur semua ruas jalan nasional dan jalan provinsi dapat dihubungkan dan layak untuk dilalui kendaraan dengan permukaan jalan beraspal. Pada ruas jalan provinsi yang telah terhubung ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat dilalui kendaraan berat.

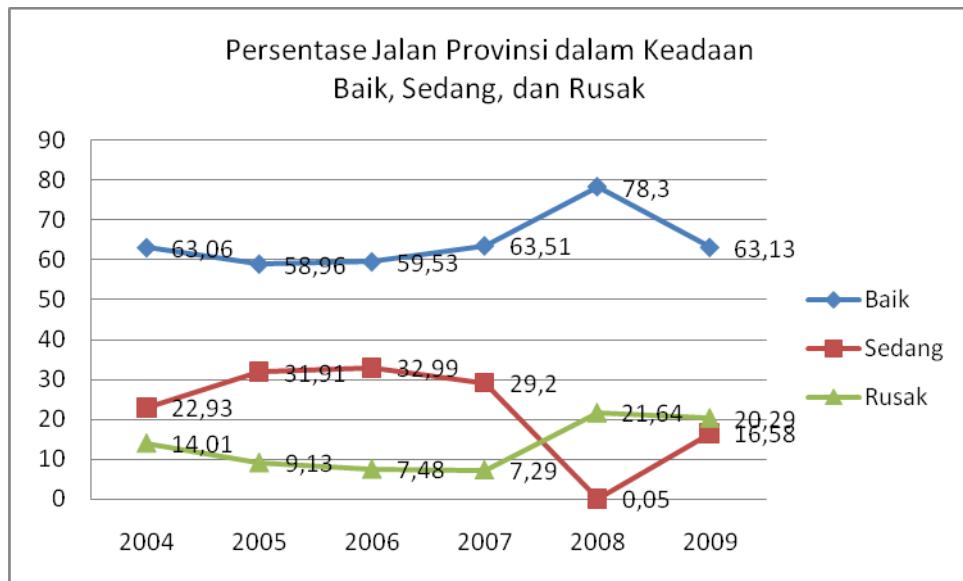
Jalan lintas di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari tiga poros utama, yaitu poros Selatan, poros Tengah dan poros Utara. Poros Selatan merupakan jalan dengan ruas jalan di daerah perbatasan Kalimantan Selatan yaitu Batu Aji – Tanah Grogor – Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta – Tanjung Redeb – Tanjung Selor. Jalan lintas poros Tengah meliputi ruas jalan Samarinda – Loa Janan – Tenggarong, Senoni – Kota Bangun – Blusuh – Batas Kalimantan Tengah. Sedangkan jalan poros Utara yang meliputi ruas jalan di daerah perbatasan mulai daerah Tanjung Selor – Malinau – Simanggaris – Batas Negara – Nunukan – Jalan lingkaran P. Sebatik.

Kerusakan jalan yang terjadi di ruas antara Sangatta – Tanjung Redeb yaitu di antara Kombeng dan Kelay. Kerusakan jalan ini menghambat transportasi dari Samarinda ke Tanjung Redeb.

Perkembangan jalan nasional dan provinsi dalam keadaan baik, sedang, dan rusak sejak tahun 2004 sampai 2009 di Provinsi Kalimantan Timur seperti pada Gambar 17.



Gambar 15. Persentase Jalan Nasional dalam Keadaan Baik, Sedang, dan Rusak di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 16. Persentase Jalan Provinsi dalam Keadaan Baik, Sedang, dan Rusak.

Panjang jalan negara dalam kurun waktu lima tahun sejak 2004 sampai 2009 mengalami kenaikan. Penambahan panjang negara pada tahun 2006 dengan panjang jalan 1538,74 km meningkat 313,53 km dibandingkan tahun sebelumnya 2005. Tetapi panjang jalan ini tidak bertambah sampai tahun 2009. **Panjang jalan negara** dalam kondisi baik pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan

pada tahun 2004 dan 2005. Menurunnya kualitas jalan tersebut terjadi karena cepatnya terjadi kerusakan akibat alam, seperti longsor, badan jalan yang labil, sering terjadi genangan dan lainnya sehingga umur masa pakai lebih pendek dari yang ditargetkan. Sementara anggaran yang disediakan untuk perbaikan jalan masih terbatas sehingga usaha untuk perbaikan tidak sejalan dengan lajunya tingkat kerusakan. Dengan adanya perhatian yang besar terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2007 persentase jalan dalam keadaan baik lebih meningkat, pada tahun 2008 dan 2009 kualitas jalan negara lebih baik mencapai 69,96% dan 74,34%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan perbaikan jalan walaupun kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2004, dan 2005.

Panjang jalan provinsi di Kalimantan Timur sejak tahun 2004 sampai 2009 tetap sepanjang 1762,07 km berarti tidak terdapat penambahan ruas jalan yang dibangun. Sementara itu dari panjang jalan tersebut, **panjang jalan provinsi** dalam keadaan baik pada tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan puncaknya pada tahun 2008. Keadaan ini terjadi berubah pada tahun 2009 kondisi jalan dalam keadaan baik hanya mencapai 63,19%. Kondisi ini dipicu oleh keadaan jalan yang kurang mantap, jalan yang ada merupakan jalan bekas jalan HPH dan bekas jalan tambang, pembangunannya tidak dilaksanakan secara komprehensif. Disamping itu dengan meningkatnya pembangunan di berbagai daerah terutama daerah pemekaran maka semakin meningkat volume kendaraan angkutan berat yang melalui ruas jalan dengan beban muatan yang melebihi kapasitas jalan.

h. Pertanian

1). Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun

Sebagai provinsi yang terletak cukup strategis dan sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia Provinsi Kalimantan Timur selama ini merupakan penghasil devisa yang cukup besar terhadap negara yaitu dari potensi sumberdaya alam terutama hutan, batubara, dan migas. Untuk mengantisipasi menurunnya sumberdaya alam terutama yang bersifat tidak dapat diperbaharui (*non renewable*)

seperti minyak dan gas bumi serta batu bara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan diberbagai bidang. Tahun 2003-2008 pemerintah provinsi telah melaksanakan tiga program prioritas (*Grand Strategi*) pembangunan yang meliputi; (1) pembangunan pertanian dalam arti luas; (2) peningkatan sumberdaya manusia; dan (3) pembangunan infrastruktur. Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang pada RPJMD tahun 2009-2013 masih tetap memberikan prioritas pada ketiga sektor tersebut. Sub sektor hortikultura, dan sub sektor perkebunan, sedangkan sub sektor lainnya yaitu sub sektor tanaman pangan dan sub sektor ikan lebih rendah masing-masing hanya 92,32 dan 96,66. Pada tahun 2009 keadaan ini tidak jauh berbeda, dengan nilai tukat petani tertinggi pada sub sektor ternak 117,81, sementara sub sektor lainnya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya penghasilan dan daya beli masyarakat, permintaan terhadap kebutuhan pangan berupa sumber protein hewan meningkat. Hal ini memberikan dampak perbaikan harga terhadap hasil ternak dan selanjutnya meningkatnya pendapatan petani ternak. Pada beberapa tahun terakhir pemerintah provinsi melalui Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur gencar melakukan sosialisasi terhadap pentingnya mengkonsumsi sumber protein hewan seperti daging, telur dan susu.

Indeks Tukar petani yang merupakan perbandingan antara **indeks harga yang diterima** petani dengan **indeks harga yang dibayar** petani. Indeks Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2004 sampai 2007. Penurunan yang lebih tajam pada tahun 2007 hingga hanya 77,78. Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 mengalami kenaikan masing-masing mencapai 101,40 dan 100,25. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat perbaikan harga jual hasil pertanian. Meningkatnya Indeks Nilai Tukar Petani pada tahun 2008, terutama ditunjang oleh sub sektor ternak mencapai 120,61

2). PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDRB) provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2004 – 2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2007 mencapai Rp 15.666.541.000,89,- dibandingkan tahun sebelumnya 2006 Rp 10.792.274.000,00,-.

Struktur PDRB non migas didominasi oleh lima sektor yaitu sektor pertambangan, sektor perdagangan hotel dan restoran, **sektor pertanian**, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan, dan sektor komunikasi. Diantara sektor tersebut sektor **pertanian menempati urutan ke 3** setelah sektor pertambangan dan sektor perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian di Kalimantan Timur. PDRB sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

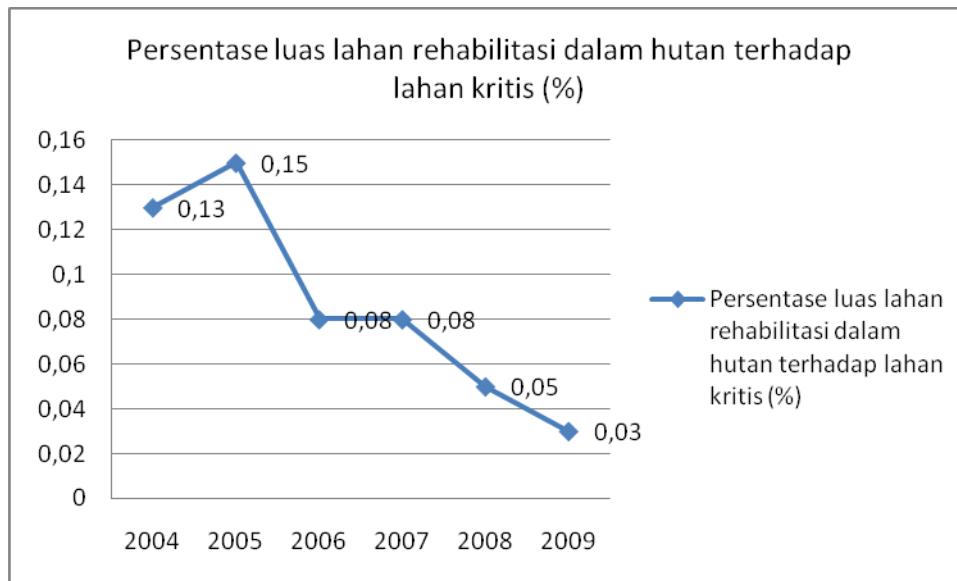
Sejak tahun 2004 – 2009 PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai tahun 2008. Pada tahun 2009 terjadi penurunan tetapi masih lebih baik daripada tahun 2007. Peningkatan yang terjadi tersebut ditunjang dengan semakin membaiknya iklim, investasi di Kalimantan Timur termasuk investasi di bidang pertanian secara luas. Peningkatan yang pesat pada sub sektor perkebunan.

i. Kehutanan

Hasil identifikasi data yang digunakan untuk menganalisis indikator kehutanan tahun 2004 – 2009 diperoleh dari data Sub Direktorat Reboisasi, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Kementerian Kehutanan dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam – Berau serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Didasarkan Gambar 16, dapat digambarkan kecenderungan (*trend*) persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%) dari tahun 2004 -2009.

Gambar 17 menunjukkan bahwa nilai persentase capaian indikator kehutanan dalam pelaksanaan/realisasi penanaman yang berupa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%) di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 menuju tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi penurunan nilai persentasenya yakni pada tahun 2004 (0,10%), tahun 2005 (0,08%) dan tahun 2006 (0,05%). Terjadinya penurunan tersebut disebabkan oleh kemampuan/distribusi alokasi dana tahunan yang berasal dari sumber dana GN RHL Kalimantan Timur dan sumber dana DBH SDA HUT DR Kalimantan Timur.



Gambar 17. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis (%).

Pada tahun 2004 dari sumber dana GN RHL dapat direalisasikan penanaman seluas 1.900 Ha dan sumber dana DBH SDA HUT DR dapat direalisasikan penanaman seluas 2.380 Ha, pada tahun 2005 dari sumber dana GN RHL dapat direalisasikan penanaman seluas 1.250 Ha dan sumber dana DBH SDA HUT DR dapat direalisasikan penanaman seluas 2.337 Ha, pada tahun 2006 hanya dari sumber dana GN RHL dapat direalisasikan penanaman seluas 2.150 Ha. Pada tahun 2004 dan tahun 2005 realisasi penanaman dari alokasi dana yang bersumber dari dana DBH SDA HUT DR relatif lebih besar dibandingkan dengan yang bersumber dari dana GN RHL, namun demikian pada tahun 2006 hanya bersumber dari alokasi dana GN RHL.

Dari tahun 2006 menuju tahun 2007 dan tahun 2008 nilai persentase capaian pelaksanaan/realisasi penanaman relatif konstan atau sama yakni masing-masing sekitar 0.05%, hal ini disebabkan oleh pada tahun 2006 alokasi dana hanya bersumber dari dana GN RHL, sedangkan pada tahun 2007 alokasi dana hanya bersumber dari dana DBH SDA HUT DR dapat direalisasikan penanaman seluas 2.101 Ha dan pada tahun 2008 alokasi dana juga hanya bersumber dari dana DBH SDA HUT DR dapat direalisasikan penanaman seluas 2.100 Ha.

Dari tahun 2008 menuju tahun 2009 nilai persentase capaian pelaksanaan/realisasi penanaman terjadi penurunan yakni pada tahun 2008 alokasi dana hanya bersumber dari dana DBH SDA HUT DR dapat direalisasikan penanaman seluas

2.100 Ha, sedangkan pada tahun 2009 alokasi dana hanya bersumber dari dana DBH SDA HUT DR dapat direalisasikan penanaman seluas 1.200 Ha.

Secara keseluruhan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 nilai persentase capaian pelaksanaan/realisasi penanaman terjadi penurunan, hal ini karena alokasi dana yang bersumber dari dana GN RHL untuk pelaksanaan kegiatan penanaman berakhir sampai dengan tahun 2007, meskipun mulai tahun 2004 sampai dengan 2007 ditopang oleh alokasi dana yang bersumber dari dana DBH SDA HUT DR, selanjutnya pada tahun 2008 dan tahun 2009 hanya mengandalkan alokasi dana yang bersumber dari dana DBH SDA HUT DR yang cenderung kemampuan penyediaan dananya mengalami penurunan, selain itu juga terdapat beberapa kendala seperti kesiapan masing-masing daerah kabupaten/kota dalam penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) maupun Rancangan Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rantek RHL), serta administrasi alokasi dana yang bersumber dari dana DBH SDA HUT DR Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, ke depan pelaksanaan kegiatan/realisasi penanaman perlu diupayakan peningkatan luasan dan efektivitasnya, mengingat capaian pelaksanaan kegiatan/realisasi penanaman pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 di dalam kawasan hutan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 15.418 Ha atau sekitar 0,36% dari luas lahan kritis di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sekitar 4.277.918 Ha, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasinya jauh relatif masih sedikit luasannya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan masih belum memadainya kemampuan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang memang membutuhkan dana relatif besar karena luasan lahan kritis yang relatif luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penggalan dana dari sumber-sumber lainnya yang terkait untuk menambah keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah. Sehingga, diharapkan pelaksanaan kegiatan penanaman di lahan kritis harus tetap dilanjutkan bahkan kalau mungkin ditingkatkan luasannya, guna mengantisipasi adanya perluasan degradasi hutan dan lahan termasuk perluasan lahan kritis antara lain dapat mengancam terjadinya peningkatan laju erosi tanah dan laju sedimen yang tidak terkendali serta terjadinya bencana banjir, selain itu peningkatan/perluasan pelaksanaan kegiatan penanaman secara simultan ke depan juga sangat

bermanfaat untuk menopang upaya penanggulangan pemanasan global/perubahan iklim.

j. Kelautan

Hasil identifikasi data yang digunakan untuk menganalisis indikator kelautan tahun 2004 – 2009 diperoleh dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur,

Nilai persentase capaian indikator kelautan dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2004 – 2009 yang berupa jumlah tindak pidana perikanan jumlahnya relatif berfluktuasi meskipun selama periode tersebut khususnya pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlahnya, sementara itu luas kawasan konservasi laut relatif sama yaitu sekitar 500 Km².

Terjadinya tindak pidana perikanan diantaranya karena dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara illegal bahkan tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan habitat serta lingkungan, bahkan kerusakan yang terjadi sebagian besar karena ulah manusia yang mengesplotasi sumber daya tersebut secara berlebihan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan tujuan ingin mendapatkan hasil tangkapan yang cepat dan banyak telah merusak ekosistem terumbu karang. Cara ini selain merusak terumbu karang yang telah ada juga merusak terumbu karang yang sedang dan yang akan tumbuh. Lebih parah lagi peledakan yang berulang-ulang dan daya ledak yang cukup besar telah merusak ekosistem, sehingga diperlukan pemulihan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Terganggunya habitat dan penopang lingkungan untuk pertumbuhan terumbu karang sangat mempengaruhi untuk pulihnya keadaan seperti semula.

Terumbu karang yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Berau merupakan salah satu terumbu karang yang terindah di Indonesia, sehingga menjadi obyek/kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Terdapat beberapa pulau kecil di lepas pantai Kabupaten Berau seperti P. Derawan, P. Maratua, P. Panjang, P. Kakaban dan lainnya yang mempunyai terumbu karang yang sangat indah. Di beberapa pulau-pulau kecil tersebut selain tempat/habitat berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya juga tempat bertelurnya penyu yang sejak lama menjadi sumber pendapatan masyarakat dan negara. Selain itu, ekosistem wilayah pesisir dan laut menyediakan sumberdaya

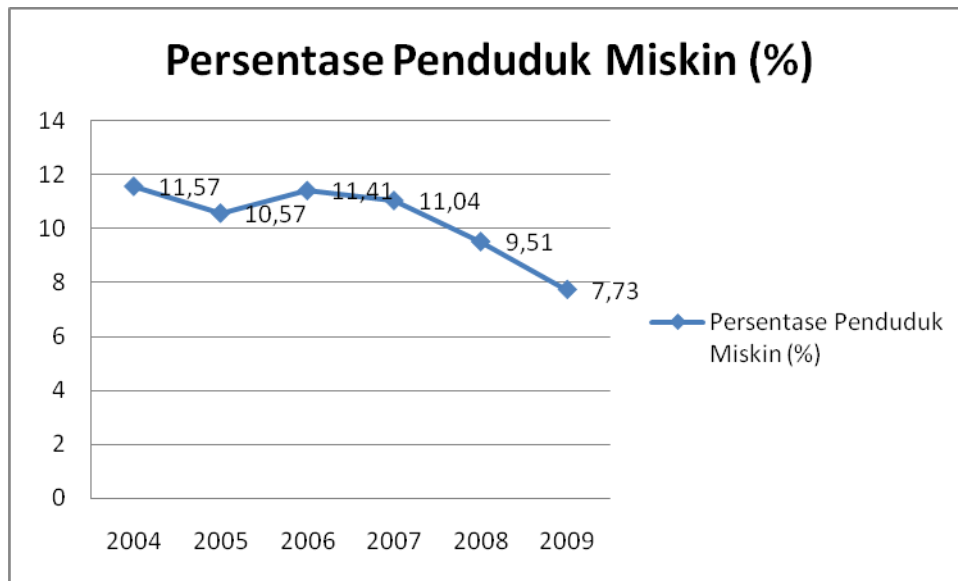
alam yang produktif baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, seperti sumberdaya alam hayati yang dapat pulih, diantaranya sumber perikanan, mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Wilayah pesisir merupakan penyedia sumberdaya alam yang produktif, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang dapat pulih harus dilakukan dengan tepat agar tidak melebihi kemampuannya untuk memulihkan diri pada periode waktu tertentu. Agar lingkungan dapat lestari diperlukan kecermatan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang tidak dapat pulih, sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya.

k. Kesejahteraan Sosial

1). Persentase Penduduk Miskin

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk yang bersangkutan untuk mencapai atau memenuhi standar hidup minimum tertentu. Standar kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia adalah \$ 1 per hari. Persentase penduduk miskin di Kaltim semakin menurun yang mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah untuk memerangi kemiskinan memang perlu diberikan apresiasi dan diharapkan pada tahun 2015 akan terentaskan sesuai dengan sasaran MDG's.

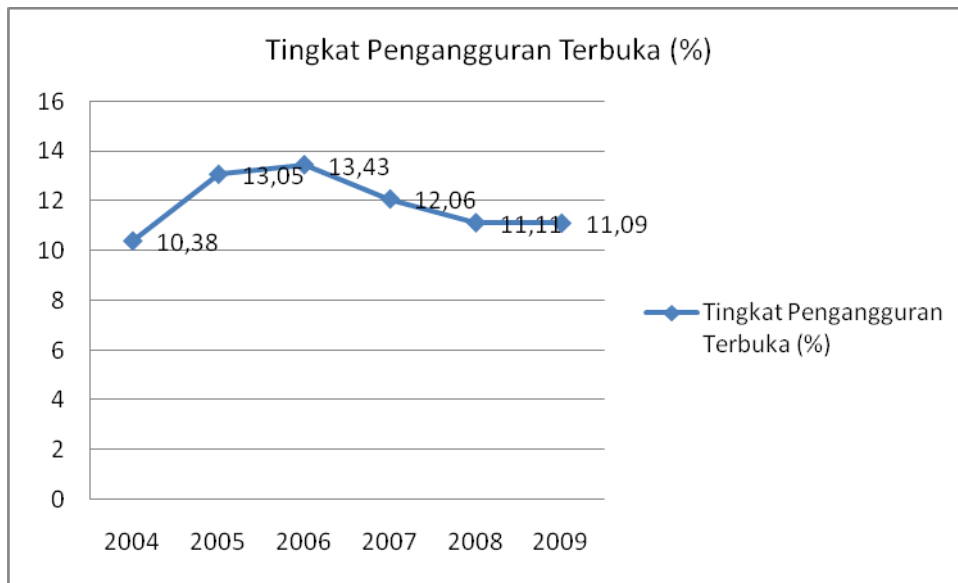


Gambar 18. Pertumbuhan Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur.

2). Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang berpengaruh langsung bagi standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Indikator di bidang ketenagakerjaan ini tidak saja sering menjadi topic hangat dalam membahas masalah ekonomi namun juga sering menjadi topik hangat dari perdebatan politik. Sehingga banyak politisi seringkali menggunakan kesengsaraan indeks (*miseri index*) yang merupakan penjumlahan dari inflasi dan tingkat pengangguran untuk menghitung sehat atau tidaknya perekonomian, atau indeks ini dapat digunakan sebagai symbol kesuksesan maupun kegagalan dari kebijaksanaan ekonomi.

Tingkat pengangguran menunjukkan persentase jumlah orang yang ingin bekerja tapi belum memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia selain itu juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diikuti dengan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula sehingga antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menjadi tidak seimbang. Gambaran Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 19. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Perkembangan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur cenderung menurun, berdasarkan data secara keseluruhan menggambarkan bahwa tahun 2006 adalah titik puncak dari tingkat pengangguran yang tinggi, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kesenjangan antara pencari kerja sebesar 91,118 orang dan kesempatan kerja yang sebesar 53.496. Disamping itu kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada periode 2005 dan 2006 juga memberikan pengaruh yang besar karena mobilitas penduduk yang masuk ke Kalimantan Timur cukup besar, selama periode 2006 – 2008 angkatan kerja di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 92 ribu orang.

Pada tahun 2008 pengangguran terbuka mengalami penurunan, karena pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, kondisi dapat digambarkan dari jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat dari 1.091.625 menjadi 1.259.587 orang, meskipun belum terpenuhi semuanya namun demikian program tersebut dapat menurunkan jumlah pengangguran di Kalimantan Timur.

Tahun 2009 pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan kembali sebagai dampak dari program yang dijalankan di tahun sebelumnya, selain itu tingkat pertumbuhan penduduk juga mengalami penurunan yang cukup berarti yakni 3,02 pada tahun 2007 menjadi 2,27% tahun 2009.

'3. Rekomendasi dan kebijakan

a. Indek Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan ke 5 (lima) secara nasional, meskipun demikian masih perlu diperhatikan perbaikan indikator dibidang yang membentuk IPM tersebut sehingga harapan untuk mencapai IPM urutan ke 3 akan dicapai pada tahun 2013.

b. Pendidikan

1. Akses Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya pendidikan menengah keatas lebih terbuka dan memperhatikan penduduk didaerah-daerah pedalaman dan perbatasan yang angka putus sekolahnya lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan.
2. Perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan harus diperhatikan, terutama kualitas pendidikan guru-guru yang ada di daerah pedalaman dan perbatasan.

c. Kesehatan

1. Meningkatkan jangkauan kesehatan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada level masyarakat menengah ke bawah.
3. Memperluas jangkauan informasi tentang praktek-praktek kesehatan yang mendasar.

d. Keluarga Berencana

1. Memperluas jangkauan pelayanan KB dengan menyediakan alat kontrasepsi yang aman dan murah.
2. Memperbaiki system administrasi kependudukan

e. Ekonomi Makro

1. Dalam waktu dekat harus mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbaharui.

2. Upaya perbaikan struktur perekonomian agar tidak terjadi kesejajangan antara sector pertanian, industri, dan jasa.
3. Meningkatkan sumbangan out put manufactur terhadap PDRB.

f. Investasi

1. Memberikan layanan prima kepada investor dan dapat menghemat waktu pengurusan izin.
2. Membuat satu program yang menginformasikan struktur ekonomi yang dapat dikembangkan.
3. Memperbaiki iklim investasi dengan kepastian hukum yang berlaku di Kalimantan Timur maupun di Indonesia

g. Infrastruktur

1. Sebagai provinsi yang memiliki luas wilayah yang luas Provinsi Kalimantan Timur terus membangun infrastruktur terutama yang dapat menggerakkan sektor ekonomi seperti pembangunan jalan, jembatan dapat membuka isolasi daerah juga mempermudah pengangkutan hasil-hasil bumi dan lainnya.
2. Meningkatkan pemeliharaan atas insfrastruktur yang telah dibangun, sehingga efisiensi penggunaan dapat ditingkatkan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan infrastruktir yang telah dibangun misalnya penggunaan jalan agar diawasi dan dipantau sesuai dengan daya dukung jalan, agar umur jalan dapat ditingkatkan.
4. Kualitas jalan perlu ditingkatkan, perlu adanya pengawasan yang serius dalam pembangunan jalan sehinga sesuai dengan standart.
5. Memperbaiki sistem drainase sehingga tidak terjadi genangan dan banjir yang dapat merusak jaringan jalan.

h. Pertanian

1. Memberikan kepastian harga kepada petani, terutama apabila panen dan produksi melimpah pemerintah dapat menampung dan membeli hasil panen melalui koperasi dan lainnya.
2. Memberikan dana talangan apabila terjadi kegagalan panen yang serius dan adanya gangguan alam secara massal.

3. Perlu peningkatan jaringan irigasi untuk persawahan, terutama daerah yang memiliki lahan sawah potensial, agar IP dapat ditingkatkan dan menghindari terjadinya kekeringan.
4. Menetapkan kepastian hukum terhadap lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Selama ini dengan maraknya pertambangan batubara, lahan pertanian yang produktif beralih fungsi menjadi lahan pertambangan batubara baik langsung maupun tidak langsung.
5. Sarana produksi ditingkatkan keberadaannya dan dengan harga yang terjangkau.
6. Jalan usaha tani ditingkatkan untuk menunjang usaha pertanian dan mempermudah pengangkutan hasil panen.

i. Kehutanan dan tata ruang

1. Perlu percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, guna mengantisipasi percepatan laju penggunaan/pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan.
2. Mengingat kejadian banjir relatif sering setiap tahunnya dan hampir merata terjadi pada ibukota-ibukota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu ditingkatkan pembangunan prasarana pengendalian banjir di wilayah ibukota-ibukota Kabupaten/Kota.
3. Perlu ditingkatkan luasan kegiatan rehabilitasi setiap tahunnya, karena hasil rehabilitasi hutan dan lahan selama ini masih jauh atau relatif kecil bila dibandingkan dengan keberadaan luasan lahan kritis, sehingga untuk merealisasikan peningkatan luasan hasil rehabilitasi ini, selain dibutuhkan dana dari DAK DR Kalimantan Timur juga diperlukan penggalan dana dari sumber-sumber dana lainnya.
4. Agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan penekanan laju deforestasi dapat berhasil secara optimal dan efektif, diantaranya perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar program-program yang terkait seperti program pengelolaan/pemanfaatan hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), program Kaltim Hijau (*Kaltim Green*) dan program REDD, program-program tersebut juga diharapkan dapat menopang dalam upaya mengantisipasi pemanasan global/perubahan iklim.

5. Dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan, perlu diintensifkan dan dioptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada berbagai kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, selain itu juga perlu diupayakan penegakan hukum secara tegas dan efektif.
6. Mengingat adanya pengaruh perubahan iklim global dewasa ini, Provinsi Kalimantan Timur termasuk daerah-daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, perlu segera menyusun program Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim, karena sistem peringatan dini tersebut sangat berperan penting, baik dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana maupun untuk kepentingan kegiatan lainnya.

j. Kesejahteraan Sosial

1. Membuat program terpadu untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan di daerah perkotaan maupun di pedesaan
2. Investasi harus mampu membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan setempat.

D. KESIMPULAN

1. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

Secara umum Provinsi Kalimantan Timur dalam agenda aman dan damai ini relatif baik karena dukungan data yang berkaitan dengan indeks kriminalitas yang cenderung turun, terutama dalam periode dua tahun terkait 2008 – 2009. Demikian juga halnya dengan kejahatan konvensional dan transnasional cenderung menurun, meskipun demikian kewaspadaan harus tetap dilakukan karena pada tahun tertentu yang tidak termasuk dalam periode penelitian Provinsi Kalimantan Timur pernah menjadi tempat persembunyian salah seorang kawan teroris bom Bali. Dengan demikian aparat dan masyarakat dapat saling bersinergi dalam menjaga kondisi keamanan dan kewaspadaan wilayah ini, agar tetap terjaga kondisi keamanan yang kondusif dan tercipta pula kehidupan yang damai.

Dalam konteks ini pemerintah harus berupaya menjembatani untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin agar kesejajaran

tersebut tidak menjadi pemicu terjadinya kegiatan kriminalitas yang melawan hukum dan meresahkan masyarakat.

2. Agenda Pembangunan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

Upaya perbaikan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel nampaknya masih perlu ditingkatkan karena di Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan SKPD, namun demikian kasus korupsi yang terdapat di wilayah ini dapat diselesaikan menjadi 60%.

Pelayanan publik lainnya masih perlu ditingkatkan, karena hanya ada sebagian kecil dari 14 kabupaten kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, demikian pula dengan lap[oran keuangan pemerintah, persentase kabupaten kota yang memiliki laporan keuangan pada tahun 2009 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hanya ada tiga. Provinsi Kalimantan Timur sendiri selama dua tahun berturut-turut mendapatkan "*adverse opinion*" atau tidak wajar yang disebabkan oleh kelemahan dalam pelaporan dan pencatatan serta masalah aset yang belum jelas. Selain itu 10 Kabupaten/Kota mendapat predikat yang sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan satu Kabupaten mendapat predikat *disclaimer*.

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat meskipun masih berada di bawah nasional, keterlibatan wanita dalam mengambil keputusan dan kontribusinya dalam sosial ekonomi juga semakin meningkat, perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap gender ini diwujudkan dengan dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Anak dalam dua tahun terakhir.

3. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Capaian indikator dalam agenda ini sudah cukup baik terutama bila diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga unsur yang membentuk IPM sudah baik, sehingga IPM Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi lima secara nasional. Dibidang pendidikan secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan peningkatan dalam periode 2004-2009.

Upaya pelayanan kesehatan masih dititik beratkan pada pelayanan akses atau jangkauan pelayanan di daerah terpencil dan perbatasan, karena daerah ini cukup sulit untuk ditempuh yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur jalan

yang menghubungkan antara satu daerah dengan lainnya. Meskipun demikian capaian indikator Angka Kematian Bayi berhasil diturunkan terutama pada dua tahun terakhir. Layanan puskesmas 24 jam diberlakukan pada daerah tertentu dan juga diikuti dengan pendirian Puskesmas Pembantu (PUSTU).

Keluarga Berencana masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan alat kontrasepsi yang aman dan murah. KB menjadi ujung tombak keberhasilan penurunan pertumbuhan penduduk secara alami, untuk itu dukungan dana masih sangat dibutuhkan mengingat bahwa BKKBN adalah instansi vertikal langsung di bawah kendali Pusat.

Makro ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih cukup baik karena ekonominya tumbuh positif berkisar antara 1 sampai 4%, yang patut menjadi perhatian adalah bahwa perekonomian sangat tergantung kepada sumber daya alam yang tak terbarui, tahun 2008 sumbangan sektor ini kepada PDRB mencapai 80% lebih. Inflasi yang tinggi terjadi disebabkan oleh pasokan bahan pangan yang terlambat dan menyebabkan kenaikan harga komoditas tersebut.

Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu untuk ditingkatkan, terutama jalan baik pembuatan jalan baru maupun peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Hal ini penting selain untuk memperlancar arus perekonomian juga membuka daerah yang selama ini terisolir. Pembangunan jalan di daerah perbatasan juga merupakan agenda yang saat ini tengah diperhatikan pemerintah Provinsi, dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan daerah wilayah Malaysia.

Nilai indeks tukar petani di Provinsi Kalimantan Timur terdapat kenaikan selama kurun waktu 2004 – 2009. Kenaikan ini disebabkan adanya perbaikan harga dan meningkatnya kebutuhan terhadap pangan.

PDRB sektor pertanian juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya pertanian dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pertanian merupakan salah satu dari tiga grand strategi selain peningkatan sumberdaya manusia, dan infrastruktur.

Kesejahteraan sosial dengan dua indikator utama yakni persentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang positif, artinya persentasenya semakin menurun. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kalimantan timur untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran cenderung menurun setelah tahun 2006,

namun masih berada di dua digit yakni 11,09% tahun 2009. Perluasan sub sektor perkebunan kelapa sawit telah mampu menciptakan lapangan kerja banyak untuk tenaga kerja di Kalimantan Timur.

BAB III

RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2009 – 2013.

1. Pengantar.

Perspektif Kalimantan Timur selama 5 tahun ke depan didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu yang diprediksi menurut asumsi cetiris paribus. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial.

Identifikasi relevansi prioritas/program RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas/program aksi pembangunan nasional, menggunakan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya.

2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Daerah 2004 – 2009.

Hasil penelusuran relevansi prioritas dan program aksi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan prioritas dan program aksi pembangunan nasional seperti terlihat pada Tabel 19

Tabel 19. Proritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional

| No. | RPJMN 2010-2014 | | RPJMD Provinsi Tahun 2009 – 2013 | | Analisis kualitatif | Penjelasan terhadap analisis kualitatif |
|-----|-----------------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| | Prioritas Pembangunan | Program Aksi | Prioritas pembangunan | Program | | |
| 1. | PRIORITAS 1. | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA | | | | |
| | | <p>Otonomi Daerah : Penataan Otonomi Daerah Melalui :</p> <p>*Penghentian atau pembatasan pemekaran wilayah</p> <p>*Peningkatatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah</p> <p>*Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah</p> | <p>Pemekaran provinsi</p> <p>-</p> | <p>Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Pembentukan Kabupaten Kutai Pantai.</p> <p>-</p> | <p>Tidak ada program ddaerah yang mendukung prioritas /program nasional.</p> <p>Tidak ada*</p> | <p>Untuk Kaltim masih ada pemekaran wilayah karena kabupaten kota masih dianggap terlalu luas.</p> <p>Pemerintah Kaltim mempunyai komitmen untuk mengelola keuangan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------|---|
| | | <p>Regulasi :</p> <p>*Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah selambat-lambatnya 2011</p> | | | Tidak ada | Harmonisasi dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah. |
| | | <p>Sinergi antara pusat dan daerah :</p> <p>*Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> | Mendorong penyerasian peraturan tentang pelayanan publik. | Meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah melalui pengembangan kapasitas dan koordinasi. | Ada. | Termasuk dalam arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang hukum, politik, dan pemerintahan. |
| | | <p>Penegakan Hukum :</p> <p>*Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum</p> | Penegakan dan pelayanan hukum bagi masyarakat Kaltim | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tidak pelanggaran hukum dan korupsi. 2. Menciptakan kehidupan yang tertib hukum. | Ada | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|--|---|---|
| | | <p>Data Kependudukan:</p> <p>. Penetapan Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya 2011</p> | - | Penataan administrasi kependudukan. | Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas nasional | Karena program nasional seluruh daerah kabupaten kota telah menggunakan sistem informasi kependudukan dan menggunakan NIK dan SIAK, sehingga secara eksplisit tidak perlu lagi dimasukkan di RPJM |
| 2. | PRIORITAS 2 PENDIDIKAN. | | | | | |
| | | <p>*Peningkatan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar</p> <p>*APM pendidikan setingkat SMP</p> <p>*angka partisipasi kasar (ATK) pendidikan setingkat SMA</p> <p>*Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS</p> <p>*Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30 – 50 % selambat-lambatnya 2012 dan</p> | Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah pedesaan, pedalaman dan perbatasan | <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar • Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar • Peningkatan mutu dan | <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak sekolah-sekolah yang memungut tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah • Belum banyak terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana terutama daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan dikarenakan mahal biaya | Hendaknya ada evaluasi dan penindakan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah yang masih memungut biaya, sehingga wajib belajar dapat ditingkatkan |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | *Penyediaan sambungan internet ber-conten pendidikan kesekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ketingkat sekolah dasar: | | <p>profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai dengan standar mutu nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan anggaran pendidikan sebesar 20% se Kaltim. | transportasi bahan baku. | |
| | | <p>Akses Pendidikan Tinggi :</p> <p>*Peningkatan APK pendidikan tinggi</p> | Pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi. | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peranan perguruan tinggi terhadap dunia kerja dalam penyediaan SDM • Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan stakeholder (pemerintah kabupaten/kota, perusahaan-perusahaan) dalam pemanfaatan hasil penelitian | Belum banyak tersedianya tenaga ahli PT yang relevan dengan dunia kerja, khususnya dibidang yang dibutuhkan perusahaan. Seperti teknik kimia, geologi dsb. | |
| | | <p>Pengelolaan :</p> <p>*Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai menejer sistem pendidikan yang unggul</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan manajemen pendidikan • Peningkatan pemerataan dan | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>*Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i></p> <p>*Mendorong aktivasi peran komite sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan dewan pendidikan di tingkat kabupaten</p> | <p>kualitas pendidikan yang mampu menunjang peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa</p> | | | |
| | | <p>Kurikulum :</p> <p>*Penataan ulang kurikulum sekolah</p> | | | | |
| | | <p>Kualitas :</p> <p>*Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|---|--|---|
| 3. | <p>PRIORITAS 3 :</p> <p>KESEHATAN</p> | <p>Kesehatan masyarakat :</p> <p>. Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu</p> | <p>Upaya pelayanan kesehatan ke masyarakat</p> | <p>1.Pelayanan Puskesmas 24 jam</p> <p>2.Menambah jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu</p> <p>3.Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai</p> <p>4.Peningkatan jangkauan kesehatan pada daerah terpencil dan terluar</p> <p>5.Peningkatan pelayanan kesehatan balita dan lansia.</p> | <p>Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional</p> | <p>Masalah kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang penting untuk dilaksanakan setiap daerah terutama yang berkaitan dengan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya penurunan derajat kesehatan dan mengurangi faktor resiko penyakit.</p> |
| | | <p>KB;</p> <p>. Peningkatan kualitas dan jangkauan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;</p> | | | <p>Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional</p> | <p>Program nasional yang akan diaplikasikan ke daerah.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|
| | | Obat; . Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010 | - | 1.Pengawasan obat dan makanan 2.Pengembangan obat asli Indonesia. | Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional | Secara eksplisit tidak ada agenda di RPJMD yang secara spesifik menjelaskan tentang pemberlakuan obat esensial nasional, akan tetapi pemberlakuan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas terkait. |
| 4. | PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN | | | | | |
| | | Bantuan Sosial Terpadu : *Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program bantuan langsung tunai | - | Pendistribusian BLT | Tidak ada | Program nasional yang juga diaplikasikan di daerah. |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------|--------------------------|
| | | <p>*Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan <i>parenting education</i> mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011 – 2012.</p> | | | | |
| | | <p>PNPM Mandiri : *Penambahan anggaran PNPM mandiri</p> | <p>Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</p> | <p>1.Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.</p> <p>2.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membasngun desa.</p> <p>3.Peningkatan perembpuan di pedesaan.</p> | <p>Tidak ada</p> | <p>Program nasional.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| | | <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) :</p> <p>*Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011</p> | | | | |
| | | <p>Tim Penanggulangan Kemiskinan :</p> <p>*Revitalisasi komite nasional penanggulangan kemiskinan di bawah koordinasi wakil presiden</p> | <p>Percepatan penanggulangan kemiskinan.</p> | <p>1.Peningkatan pemberdayaan dan mengembangkan kemampuan masyarakat. 2.Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa bea siswa dan pelayanan kesehatan se cara gratis bagi keluarga tidak mampu. 3.Memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penanggulangan kemiskinan.</p> | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>*Pengembangan Struktur Ruang Sesuai RTRW</p> | <p>*Penetapan dan pelaksanaan perda tentang RTRW Prov. Kaltim dan RDRT kawasan strategis.</p> <p>*Tersusunnya dan ditetapkannya perda tentang peraturan zonasi (<i>zoning regulation</i>).</p> <p>*Pelaksanaan kegiatan non kehutanan pada kawasan budidaya kehutanan.</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|--|--|
| | | | | *Pemetaan kawasan pertanian dan hortikultura, budidaya laut, air payau dan air tawar. | | |
| | | <p>Infrastruktur</p> <p>*Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah2 sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas dan produktivitas</p> | <p>Pekerjaan Umum</p> | *Pembangunan jalan dan jembatan | Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional. | <p>Mendukung kelancaran distribusi pangan dan pemasaran hasil pertanian.</p> <p>Menunjang sektor pertanian tanaman pangan, pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa-rawa dan lainnya, dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan air, sehingga dapat meningkatkan produksi.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>*Rehabilitasi jalan dan jembatan.</p> <p>*Pembangunan saluran drainase</p> <p>*Pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa-rawa dan jaringan lainnya.</p> | | |
| | | <p>Penelitian dan Pengembangan</p> <p>*Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi.</p> | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|
| | | | <p>*Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)</p> | <p>*Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>*Penguatan dan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.</p> | <p>Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional (tetapi belum spesifik).</p> | <p>Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung berbagai penelitian. Hal ini penting karena kedepan pembangunan di Kalimantan Timur menekankan sector pertanian secara luas, hal ini perlu didukung dengan adanya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> |
|--|--|--|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>*Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dalam penelitian pembangunan.</p> <p>*Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>*Peningkatan dan penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> | | | |
| | | <p>Investasi pembiayaan dan subsidi</p> <p>*Dorongan untuk investasi pangan, pertanian dan industri pedesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah penyediaan pembiayaan yang terjangkau.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|--|---|--|
| | | | Investasi | <p>*Peningkatan promosi dan kerjasama investasi</p> <p>*Peningkatan investasi dan trealisasi investasi</p> <p>*Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasana daerah.</p> | Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional | Dorongan untuk investasi pangan pertanian dan industri pedesaan berbasis produk lokal telah dilakukan tetapi belum optimal. Hal ini selain masih rendahnya minat investor juga masih belum adanya produk daerah unggulan yang dapat menjamin kontinuitas produksi. |
| | | Pangan dan Gizi | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | <p>*Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan.</p> | <p>Petanian Tanaman Pangan</p> | <p>*Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian.</p> <p>*Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan mesin pengolahan</p> | <p>Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional</p> | <p>Program peningkatan kualitas gizi telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan mutu produk pertanian dalam arti luas.</p> |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>*Peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan.</p> <p>*Peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>*Peningkatan kesejahteraan petani.</p> | | |
| | | <p>Adaptasi perubahan iklim</p> <p>*Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | Tidak ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional | Program terhadap adaptasi perubahan iklim yang dapat mengganggu ketahanan pangan sampai saat ini masih belum dilakukan oleh pemerintah. Pada hal ini sangat penting untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan terjadi kegagalan panen yang berdampak pada ketersediaan pangan secara luas. |
| 6. | PRIORITAS 6: INFRASTRUKTUR | Tanah dan Tata Ruang: | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan dan pelaksanaan PERDA tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR kawasan strategis, serta Peraturan Zonasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas / program nasional. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemprov, Pemkab/Pemkot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sedang menyusun revisi RTRW Prov. dan RTRW kab./Kota serta RDTR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan struktur ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | (Zoning Regulation). | | PERDA Prov dan PERDA Kab./Kota untuk mendukung prioritas/program nasional. |
| | | Pengendalian Banjir: | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian banjir. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan prasarana pengendalian banjir di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas / program nasional. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota telah merencanakan pembangunan termasuk penyelesaian prasarana pengendalian banjir yang akan dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota yang dapat mendukung prioritas/program nasional. |
| 7. | PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | <p>Kepastian Hukum :</p> <p>*Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah</p> | <p>Mendukung kegiatan investasi</p> | <p>1.sinkronisasi kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>2.Peningkatan realisasi investasi</p> | <p>Tidak ada</p> | <p>Kapasitas hukum bagi investor diperlukan termasuk kepastian status lahan dan perizinan.</p> |
| | | <p>Kebijakan Ketenagakerjaan :</p> <p>*sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas lapangan kerja</p> | <p>Memperluas kesempatan kerja</p> | <p>1.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.</p> <p>2.Peningkatan kesempatan kerja</p> <p>3.Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.</p> | <p>Ada</p> | <p>Meningkatkan pembangunan disektor pertanian yang banyak menciptakan lapangan kerja.</p> |
| 8. | PRIORITAS 8 : ENERGI | | | | | |
| | | <p>Energi alternatif :</p> <p>*Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geotermal sehingga mencapai 2000 MW pada 2012 dan 5000 MW pada 2014</p> | <p>*energi terbarukan</p> | <p>*Penggunaan tanaman penghasil bioenergi sebagai alternatif pengganti bahan bakar konvensional.</p> | <p>Ada, tetapi kurang jelas</p> | <p>Usaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat menanam tanaman bioenergi telah dilakukan, tetapi belum dianalisis secara tuntas dan menyeluruh, seperti berapa rendemen dari tanaman dalam menghasilkan bio energi.</p> |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|---|
| | | <p>Hasil Ikutan dan Turunan Minyak Bimu /Gas :</p> <p>*Revitalisasi industri pengolahan hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya</p> | *pemanfaatan untuk pupuk | *Penggunaan hasil ikutan minyak bumi dan gas untuk bahan baku pabrik pupuk | Ada, belum jelas disebutkan | Hal ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam. |
| | | <p>Konversi Menuju Penggunaan Gas :</p> <p>*Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta kepala keluarga pada tahun 2010</p> | Energi dan sumber daya mineral | Diversifikasi bahan bakar | Ada | Program nasional secara bertahap mengurangi penggunaan minyak tanah. |
| 9. | PRIORITAS 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA | Perubahan Iklim: | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut. | – | – | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur relatif sedikit. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas / program nasional. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program reguler/tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh di antaranya melalui kerja sama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana luran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sumberdaya hutan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. | <p>Kalimantan Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberantasan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) dan perambahan kawasan hutan. ▪ Pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas / program nasional. | <p>Kalimantan Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program dan rencana aksi tersebut dapat menekan laju deforestasi, serta meningkatkan keberadaan dan potensi sumberdaya hutan, selain itu juga dapat bermanfaat untuk menopang antisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim. |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- Peningkatan reboisasi hutan, HTI dan penanaman kembali hasil hutan ikutan.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">▪ Antisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim melalui program Kaltim Hijau (<i>Kaltim Green</i>) tahun 2010 – 2014 dan program REDD. | | |
|--|--|--|---|--|--|

Pengendalian Kerusakan Lingkungan:

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. ▪ Pemantauan kualitas lingkungan. ▪ Pengelolaan B3 dan Limbah B3. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas / program nasional. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program dan rencana aksi tersebut dapat mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, apabila bisa diimplementasikan secara baik dan benar serta berkelanjutan, sehingga dapat menurunkan beban pencemaran lingkungan. |
|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pelaksanaan PROKASIH. ▪ Penataan dan penegakan hukum lingkungan. | | |
| Sistem Peringatan Dini: | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013. | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional. | <p>Belum ada program Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS). Sementara itu, yang ada baru pogram Sistem Peringatan Dini Bahaya Banjir dan Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> |

| Penanggulangan Bencana: | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas penanganan dan penanggulangan bencana. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan dini, pengurangan risiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. ▪ Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas / program nasional. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program dan rencana aksi tersebut bisa meningkatkan kualitas penanganan dan penanggulangan bencana, apabila diimplementasikan secara baik dan benar serta berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana. |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------|---|-------|----------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan prasarana pengendalian banjir di beberapa kabupaten/kota. . ▪ Perbaikan perumahan akibat bencana alam. | | |
| 10. | PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL, DAN PASCA KONFLIK | ▪ | | | | |
| | | Kebijakan : | ▪ Pembangunan | 1.Pembangunan | ▪ Ada | Prasana minim, perlu |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | *Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya | di daerah perbatasan | <p>infrastruktur jalan dan jembatan</p> <p>2.Subsidi ongkos angkut perbatasan dan pedalaman</p> <p>3.Pembangunan perkebunan, pertanian disepanjang perbatasan.</p> <p>4.Pembangunan pos-pos lintas batas</p> | | perhatian khusus. |
| | | Keutuhan Wilayah : *Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan Filipina pada 2010 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan batas negara | <p>1.Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan</p> <p>2.Subsidi ongkos angkut perbatasan dan pedalaman</p> <p>3.Pembangunan perkebunan, pertanian disepanjang perbatasan.</p> <p>4.Pembangunan pos-pos lintas batas</p> | | Perlu adanya perbaikan tapal batas Negara, karena banyaknya patok yang bergeser, patah dan hilang. |
| | | Daerah Tertinggal : *Pengentasan paling lambat 2014 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---|
| | | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| 11. | PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI | ▪ | | | | |
| | | Perawatan : *Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya *Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| | | Sarana : *Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat- lambatnya Oktober 2012. | | ▪ | ▪ | ▪ |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Kebijakan :</p> <p>*Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya</p> | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| | | <p>Inovasi Teknologi :</p> <p>*Peningkatan keunggulan komparatif menjadi unggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumberdaya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.</p> | <p>Kelautan dan perikanan.</p> | <p>1.Pengembangan komoditas unggulan.</p> <p>2.</p> | <p>▪ Ada, tetapi belum menyeluruh</p> | ▪ |

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Program aksi Pembangunan Nasional 2010-2014 masih belum bersinergi dengan RPJMD 2009 – 2013. Dari hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, nampak Program Nasional yang belum terlihat di Program RPJMD 2009-2013.
- b. Sebagai Lembaga Pemerintahan, secara berjenjang menyusun Rencana kerja yang berbasis kinerja yang disusun oleh BAPPEDA pada tahun yang akan datang agar dapat mengintegrasikan program RPJMN dengan RPJMD dalam rangka mendukung Kaltim Bangkit 2013.

2. Rekomendasi

Untuk mewujudkan tiga program prioritas Provinsi Kalimantan Timur :1) Revitalisasi Pertanian; (2) infrastruktur; (3) sumber daya manusia, dikaitkan dengan visi dan misi provinsi Kalimantan Timur maka :

- a. Secara kelembagaan Bappeda harus mengevaluasi dan mengkritisi aksi program yang belum terakomodir pada program RPJMD.
- b. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan baik pada RPJMN atau RPJMD melalui Bappeda perlu adanya sosialisasi pada SKPD dan lembaga lainnya agar skala prioritas dan program pembangunan berkesinambungan dapat terwujud sehingga capaian yang diinginkan searah dan sejalan.

**Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
Jalan Taman Suropati No 2
Jakarta 10310
Telpon 021 - 3926248**